



Sarbini
Moh. Dulhiah
Tarsono

**RESILIENSI
NILAI-NILAI AGAMA,
SOSIAL, DAN PENDIDIKAN**
Bagi Masyarakat Terdampak Industri

**RESILIENSI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN NILAI-
NILAI AGAMA, SOSIAL DAN PENDIDIKAN
(Kegiatan Pendampingan Bagi Masyarakat Terdampak
Industri Di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten
Majalengka)**



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Tahun 2020 M/ 1442 H**

RESILIENSI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN NILAI-NILAI AGAMA, SOSIAL DAN PENDIDIKAN

(Kegiatan Pendampingan Bagi Masyarakat Terdampak Industri Di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka)

Penulis:

Dr. H. Moh. Dulkihah., M.Si

Dr. H. Tarsono., M.Pd

Dr. H. Sarbini., M.Ag

ISBN: 978-623-6946-89-3

Penyunting:

Tarsono

Desain Sampul dan Tata letak:

Widodo Dwi Ismail A.W.

Penerbit:

LP2M UIN SGD Bandung

Jl. H.A. Nasution No. 105 Bandung

Tlp. (022) 7800525, Fax. (022)7800525

<http://lp2m.uinsgd.ac.id>

vi + 88 hlm.; 25,7 cm.

Cetakan pertama, Desember 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur patut terus kami sampaikan kepada Allah Swt., khususnya setelah tim kecil kami menyelesaikan tugas civitas akademika dalam melakukan pengabdian. Rasa syukur juga kian membunch tatkala anggota tim kami, Dr. H. Sarbini, M.Ag mengusulkan untuk diterbitkan dalam sebuah buku agar bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membaca.

Buku ini menyajikan model resiliensi masyarakat di salah satu desa kecil di wilayah timur Jawa Barat. Terlebih ditengah pandemic covid 19, dimana Sebagian besar masyarakat mengalami dampak yang luar biasa, maka kemampuan masyarakat diuji kehandalannya. Kemampuan beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang sulit menjadi penting agar bisa tetap survival. Buku ini juga menyajikam upaya resilience dari aspek agama, nilai dan Pendidikan.

Bentuk resiliensi masyarakat ditengah pandemic yang kami damping berupa penggalian modal social masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (kerjasama) satu sama lain akan menjadi modal penting dalam mengembangkan kehidupan sosial (*sociabilities*). Kemampuan menerapkan asosiasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan modal sosial (*social capital*). Penguatan kelembagaan dibangun atas kebutuhan dan kepentingan umum (*need and interest*) masyarakat. Sementara modal sosial terbentuk secara sistematis melalui suatu jaringan (*networking*), kepercayaan (*trust*), dan nilai-nilai (*values*) yang melekat dan dikonstruksikan serta disosialisasikan pada setiap individu atau kelompok baik di dalam atau pun di luar lembaga/organisasi. Pemanfaatan kelembagaan dan modal sosial dalam pengembangan masyarakat dapat dilakukan baik pada level mikro, meso, dan makro.

Pendampingan civitas akademika dalam pengembangan masyarakat merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Melalui pendampingan ini, kami berharap menemukan titik akhir dari pemberdayaan masyarakat yang tidak lain ternyata keberdayaan itu sendiri. Pada titik keberhasilan ini, masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai (*stock of knowledge*) atas eksistensi dirinya. Mereka juga memiliki kesadaran kolektif (*colective conciousness*) atas strategi tujuan, serta mereka juga memiliki berbagai sumberdaya, baik modal sosial (*social capital*), modal ekonomi (*economic capital*), modal budaya (*cultural capital*), dan modal politik (*political capital*). Kolaborasi modal-modal ini menjadi penting untuk mengembangkan model resiliensi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran LP2M UIN SGD Bandung yang sudah menjadi penopang bagi terselenggaranya pendampingan masyarakat dan terpublikasinya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan para sidang pembaca khususnya.

Bandung, Nopember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I.....	3
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan.....	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Konsep dan Metodologi.....	12
E. Metode Pemberdayaan	44
F. Lama Program	45
G. Rencana Kerja.....	45
H. Sumber Pendanaan.....	46
BAB II.....	47
PELAKSANAAN KEGIATAN	47
BAB III	86
EVALUASI KEGIATAN	86
Daftar Pustaka.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Resiliensi masyarakat atau kemampuan masyarakat beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang sulit perlu dipelihara. Terlebih pada masyarakat yang mengalami proses transisi, maka resiliensi harus tetap terjaga. Resiliensi menjadi penting ketika secara adaptif masyarakat dihadapkan pada kondisi-kondisi sulit, termasuk pada era pandemic covid 19. Salah satu hal penting yang dikedepankan dalam upaya resilience adalah pada aspek agama, nilai dan Pendidikan. Hal yang dilakukan dalam menopang resiliensi masyarakat adalah modal social masyarakat itu sendiri.

Kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (kerjasama) satu sama lain akan menjadi modal penting dalam mengembangkan kehidupan sosial (*sociabilities*). Kemampuan menerapkan asosiasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan modal sosial (*social capital*). Penguatan kelembagaan dibangun atas kebutuhan dan kepentingan umum (*need and interest*) masyarakat. Sementara modal sosial terbentuk secara sistematis melalui suatu jaringan (*networking*), kepercayaan (*trust*), dan nilai-nilai (*values*) yang melekat dan dikonstruksikan serta disosialisasikan pada setiap individu atau kelompok baik di dalam atau pun di luar lembaga/organisasi. Pemanfaatan kelembagaan dan modal sosial dalam pengembangan masyarakat dapat dilakukan baik pada level mikro, meso, dan makro.

Pengembangan masyarakat merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Titik akhir dari pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah keberdayaan itu sendiri. Pada titik keberhasilan

ini, masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai (*stock of knowledge*) atas eksistensi dirinya. Mereka juga memiliki kesadaran kolektif (*colective conciousness*) atas strategi tujuan, serta mereka juga memiliki berbagai sumberdaya, baik modal sosial (*social capital*), modal ekonomi (*economic capital*), modal budaya (*cultural capital*), dan modal politik (*political capital*).

James Coleman memberi batasan modal sosial sebagai “seperangkat sumber daya yang inheren dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial seorang anak”. Coleman menambahkan bahwa modal sosial merupakan “aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam strktur sosial” (Coleman, 1990: 300). Coleman mengemukakan bahwa ahli ekonomi telah gagal memperkenalkan relasi sosial dalam analisa mereka. “cara-cara utama teori ekonomi bergerak dari tingkat mikro aktor tunggal ketingkat makro yang melibatkan banyak aktor adalah melalui konsep “*agent representative*”. Kumpulan para aktor secara sederhana tidak sesuai dengan fenomena seperti *trust*, sementara *trust* merupakan suatu hubungan antara dua aktor”. Coleman menggunakan tiga subyek untuk menjelaskan hal tersebut, yakni: *trust*, pasar, dan perusahaan. Coleman menyatakan pokok-pokok pikirannya, antara lain: *Pertama*, dalam tindakan ekonomi tidak cukup membahas aktor dan kepentingannya, penting pula dibahas “sumberdaya” dan “kontrol” yang dimiliki. Jika seorang aktor memiliki kepentingan terhadap aktor lain. Kedua aktor tersebut akan berinteraksi. *Kedua*, analisa kepercayaan (*trust*) bagi Coleman dianggap sebagai suatu pertaruhan dengan kesadaran. *Ketiga*, modal sosial didefiisikan Coleman sebagai adanya relasi sosial yang dapat membantu individu ketika mencoba untuk merealisasikan kepentingannya. Suatu lembaga/organisasi mempresentasikan, misalnya, suatu bentuk modal sosial.

James Coleman juga menyatakan bahwa modal sosial merupakan “aspek dari struktur sosial serta upaya memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial” (Coleman, 1990: 300). Terdapat tiga bentuk yang dicirikan oleh *social capital*, yaitu: kewajiban dan harapan atas dasar sifat dapat dipercaya (*obligations and expectations depend on trustworthiness*), kemampuan saluran informasi (*informations channels*), dan norma-norma dengan sanksi yang efektif (*norms and effective sanctions*). Ketiga bentuk *social capital* ini dapat dibedakan dari bentuk-bentuk modal lainnya, seperti modal dana (*financial capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal manusia (*human capital*). Karena itu, maka modal sosial merupakan investasi sosial, yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan (*networking*), kepercayaan (*trust*), nilai dan norma (*value and norms*) serta kekuatan menggerakkan, dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal lainnya (*economic capital, cultural capital, political capital, and money capital*). Kerjasama atas kepercayaan tidak lepas dari unsur kekeluargaan/kekerabatan dan non-kekeluargaan/kekerabatan. Menurutnya bahwa dalam dalam sistem pertukaran ekonomi terdapat apa yang disebut *F-Connection*. *F-Connection* adalah suatu bentuk hubungan yang dibangun di antara *Families* (keluarga), *Friends* (teman), dan *Firms* (perusahaan). Masing-masing bentuk organisasi sosial ini dapat saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya.

Penjelasan Coleman mengenai *social capital* tampaknya menekankan pentingnya keseimbangan antara kajian ekonomi dan sosiologi sehingga yang mendasari keputusan individu dalam menentukan sesuatu tidak hanya didasarkan pada tujuan ekonomi semata, tetapi juga didasarkan atas tujuan sosialnya. Dengan tujuan berimbang anatara sosiologi dan ekonomi, maka akan terbentuk suatu tujuan mencapai modal manusia

(*human capital*) atau yang biasa dikenal dengan sumberdaya. Modal manusia itu sendiri dapat berupa ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu.

Sedangkan seorang ilmuwan politik Robert Putnam (1999) memberi definisi modal sosial sebagai “*jaringan-jaringan, nilai-nilai dan kepercayaan yang timbul di antara para anggota perkumpulan, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk manfaat bersama*”. Di sini modal sosial dapat dianggap sebagai investasi sosial, yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan (*networking*), kepercayaan (*trust*), nilai dan norma (*value and norms*) serta kekuatan menggerakkan, dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal lainnya (*economic capital, cultural capital, political capital, and money capital*).

Social capital dalam perspektif Fukuyama harus mengacu kepada kapasitas individu untuk mendapatkan sumber-sumber yang langka dengan memanfaatkan keanggotaannya pada suatu jaringan atau suatu struktur sosial tertentu. Fukuyama mendefinisikan bahwa “*Social capital is a capability that arises within a community of regular, honest, and cooperative behavior, based on commonly shared norms, on the part of other members of that community*” (Fukuyama, 1995: 26). Dengan pengertian lain bahwa modal sosial merupakan kemampuan yang muncul dalam suatu komunitas yang normal, jujur, kooperatif, yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku secara wajar pada bagian dari anggota komunitas tersebut.

Fukuyama menyatakan bahwa modal sosial (*social capital*) berbeda definisi dan terminologinya dengan *human capital*. Bentuk *human capital* adalah ‘pengetahuan’ dan ‘ketrampilan’ manusia. Investasi *human capital* konvensional adalah dalam bentuk seperti halnya pendidikan universitas, pelatihan menjadi seorang mekanik atau programmer computer, atau

menyelenggarakan pendidikan yang tepat lainnya. Sedangkan modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Modal sosial dapat dilembagakan dalam bentuk kelompok sosial paling kecil atau paling mendasar dan juga kelompok-kelompok masyarakat paling besar seperti halnya Negara (bangsa).

Peter Evans dalam karyanya, *Government Action, Social Capital and Development : Reviewing the Evidence on Synergy* (Evans, 1996) menganalisis kontribusi sinergi pemerintah dengan komunitas lokal pada berbagai studi empirik antara sistem irigasi (Taiwan), tenaga kerja industri (India), organisasi peasant (Mexico). Dalam tulisannya tersebut, Peter Evans menyebutkan bahwa katalisator dari pembangunan adalah terjadinya sinergi antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Keduanya dapat saling berdampingan dan sejajar, tidak bersifat dominatif yang menggambarkan hubungan *vis a vis* seperti dalam teori Marxian. Dalam teori Marxian, hubungan antara negara dan masyarakat selalu digambarkan dalam pola relasi dominasi. Negara memiliki sifat *powerfull* (*berkuasa*), sedangkan masyarakat bersifat *powerless* (pihak yang lemah). Dalam pola demikian kemungkinan untuk terjadinya sinergi akan sulit tercapai sebab keduanya dalam *mainstream* yang berseberangan.

Menurut Evans, hubungan antara negara dan masyarakat tidak dalam pola dominasi, tetapi dalam kerangka yang sinergis. Dan untuk mendukung terwujudnya sinergi harus ada beberapa prasyarat, yakni: *Pertama*, adanya hubungan yang saling melengkapi (*complementary*). Bentuk hubungan demikian tentunya tidak dapat dilakukan dalam kerangka dominatif. *Kedua*, terjalinnya hubungan yang melekat (*embededness*) secara kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kelekatan hubungan tersebut, maka membentuk suatu kepercayaan (*trust*) pada masing-masing

pihak. Sikap saling curiga dan tidak percaya akan dapat dieliminir melalui kelekatan hubungan dimana didalamnya dilakukan upaya transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab (*responsibility*).

Bourddieu (Portes, 1998: 3) dalam tulisannya *the Actes de la Recherche*, mendefinisikan *social capital* (modal sosial) dengan istilah '*the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance or recognition*'. Bourdieu (1986) juga mengemukakan kritiknya terhadap terminologi modal (*capital*) di dalam ilmu ekonomi konvensional dengan mengungkapkan bahwa modal bukan hanya sekedar alat-alat produksi, akan tetapi memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu: (a) modal ekonomi (*economic capital*), (b) modal kultural (*cultural capital*), dan (c) modal sosial (*social capital*).

Rasionalisasi pentingnya pengembangan masyarakat berbasis kelembagaan dan modal sosial di Desa Cidenokantara lain: *Pertama*, meningkatkan sumberdaya manusia di kalangan petani yang saat ini telah mengalami involusi dan ketidaktertarikan untuk menggarap lahan padi. *Kedua*, tingkat tenaga trampil (*labour skill*) masyarakat yang masih rendah yang dihadapi masyarakat Desa Cidenok. Terlebih di Desa ini sebelumnya banyak kriminalitas. Secara historis, munculnya genk motor banyak terlahir dari kaum muda di Desa Cidenokini. *Ketiga*, pengembangan lahan dengan menerapkan dan mengembangkan model-model *polyculture* sebagai usaha meningkatkan perekonomian untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat masih sangat minimalis. Selain itu, memanfaatkan lahan subur menjadi areal perumahan menjadi permasalahan tersendiri di desa ini.

Berdasarkan hasil studi awal di Desa Cidenok, Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, terdapat persoalan yang cukup krusial, yakni

pengelolaan lahan produktif. Bahkan persoalan ini mengurangi daya dukung tanah yang menjadi lahan penanaman pangan di sekitar wilayah desa.

LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung telah melakukan terobosan yang dinamis dan konstruktif melalui program pemberdayaan yang menjadi bagian dari dharma pengabdian kepada masyarakat. Capaian hasil pemberdayaan dalam kegiatan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentang problematika kehidupan sosial, ekonomi, agama, pendidikan, teknologi dan lain sebagainya, baik terbentuk suatu program jangka pendek maupun program yang akan dicanangkan dalam jangka waktu yang panjang.

Dari fakta tersebut di atas, dapat dilihat bahwa resiliensi masyarakat melekat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, pengembangan nilai serta pengembangan aspek pendidikan. Karena itu, pengembangan dan pelaksanaan dampingan terhadap masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Pengelolaan berbasis pemberdayaan berorientasi untuk meningkatkan dan mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam organisasi di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka menjadi penting untuk dilakukan.

B. Tujuan

Asistensi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mendorong adanya usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan umum pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup: (1) peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial, agama Pendidikan serta

jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan tidak mampu yang sangat memerlukan perlindungan sosial (2) peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomu, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan (3) penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksebiitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan yang disesuaikan dengan modal sosial yang dimiliki.

Adapun tujuan pemberdayaan Masyarakat Melalui aplikasi model pengembangan kelembagaan dan modal sosial di Desa Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka memiliki tujuan khusus, di antaranya:

1. Melakukan identifikasi bentuk resiliensi masyarakat di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
2. Mengidentifikasi program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Cidenok baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.
3. Melakukan asistensi pada masyarakat di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
4. Ikut Berpartisipasi dalam mengembangkan kelembagaan dan modal sosial di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka

C. Ruang Lingkup

Adapun lingkup kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui aplikasi model pengembangan masyarakat berbasis kelembagaan dan modal sosial di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Melakukan diskusi persiapan identifikasi lapangan bersama-sama dengan pihak pemberi pekerjaan.
2. Melakukan studi identifikasi di lapangan mengenai lembaga-lembaga pemerintah dan NGOs yang memiliki program pemberdayaan kemiskinan di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
3. Melakukan diskusi dengan masyarakat untuk merumuskan perencanaan pemetaan.
4. Membangun koordinasi para pelaksana program pemberdayaan kemiskinan di antara lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah.
5. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi

D. Konsep dan Metodologi

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali diartikan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2014: 57).

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata *empowerment*, yakni sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat memberi peranan kepada kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek

pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan hanya bebas mengemukakan pendapat saja, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Selain itu juga dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan juga berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka (Suharto, 2014).

Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan memengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan, dan sosialisasi.

Maka dari itu, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Dikatakan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai sebuah tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yakni masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan. Serta pemberdayaan sebagai sebuah tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Parsons menyatakan bahwa pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan, yakni:

1. Aras Makro. Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
2. Asas Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-

sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Asas Mikro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*) yang bersifat luas, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungannya yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini (Suharto, 2014).

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu, pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat

dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Salah satu tugas yang menjadi tanggungjawab setiap fasilitator adalah mengkomunikasikan inovasi, dalam rangka mengubah perilaku masyarakat penerima manfaat agar tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya. Dalam hubungan ini, perlu diingat bahwa penerima manfaat pemberdayaan masyarakat sangatlah beragam. Baik beragam mengenai karakteristik individunya, beragam lingkungan fisik dan sosialnya, beragam pula kebutuhan-kebutuhannya, motivasi, serta tujuan yang diinginkannya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali diartikan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.¹ Adanya kerja sama yang saling berkesinambungan dan melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga proses *empowerment* bisa berjalan. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Konsepsi pengembangan sebagai pemberdayaan didasarkan pada penguatan kualitatif yang dilakukan fasilitator kepada kelompok atau komunitas masyarakat.

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau menjadikan

¹Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 57

sebagian kekuatan, kekuasaan pada masyarakat bersangkutan agar lebih berdaya (*survival of the fittes*) dan menekankan pada proses stimulus, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan akan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”.

People centered merupakan tatanan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya pun dominan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai pemeran utama dalam melakukan pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus pengawasan dan pertanggungjawaban secara terbuka dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Konsepsi *people centered* ini relevan dengan ruh demokrasi yang juga mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan setiap harapan dan cita-cita masyarakat itu sendiri. Tentunya, proses tersebut akan sulit dilakukan tanpa cara-cara tertentu bahkan metodologi tertentu. Oleh karena itu *empowering* menjadi mutlak dilakukan sebagai perangkat metode-metode yang dapat memudahkan masyarakat dalam mewujudkan harapan dan cita-citanya. Syarat lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana konsep *people centered, participatory* dan *empowering* itu diketahui, dipahami dan tersosialisasikan secara merata kepada masyarakat, maka dalam paradigma baru pembangunan juga mensyaratkan *sustainability* atau keberlanjutan proses dalam setiap ruang dan waktu. Pada proses ini, masyarakat akan melakukan pembangunan melalui siklus program yang pada proses pelaksanaannya melalui tahapan-tahapan tertentu yang dirancang secara *sustainable*.

Pada kenyataannya proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat dan bahkan pada negara yang menganut theisme akan mengembalikan pada nilai-nilai ketuhanan atau dalam konsep Islam disebut sebagai nilai-nilai ilahiyah.

Goals atau tujuan pemberdayaan seringkali ditujukan untuk mengangkat orang miskin supaya keluar dari kemiskinannya. Padahal lebih daripada itu, pemberdayaan bertujuan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan dengan kata lain pemberdayaan adalah proses pendidikan secara terbuka dalam kehidupan bermasyarakat yang berujung pada upaya memanusiakan manusia. Adapun secara khusus, yang menjadi tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Adapun pengelompokan yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Namun pemberdayaan kelompok lemah tersebut tetap bukan tujuan utama, karena dalam konteks pemberdayaan mutlak untuk melibatkan seluruh komponen untuk turut berpartisipasi menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Sehingga, kemiskinan, kebodohan, masyarakat marginal dan sebagainya hanya menjadi pemicu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian perubahan paradigma yang perlu dibangun dalam memahami tujuan pemberdayaan dimulai dari karakteristik masyarakat berdaya. Sebagaimana telah disampaikan pembahasan awal bahwa pemberdayaan atau empowerment/empowering adalah proses penguatan masyarakat dengan cara mendorong (motivasi), menjembatani (fasilitasi dan mediasi), serta mendampingi (advokasi) dalam meraih tujuan-tujuan yang baik di masyarakat. Dalam konteks agama, perubahan sosial masyarakat daya merupakan misi dakwah, pemberdayaan umat Islam disebut sebagai tamkiinu al-Dakwah yang memiliki makna kekuatan, kekuasaan, kepedulian dan kemauan yang keras.

Kekuasaan sejatinya tidak hanya terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam realsi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak akan terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.²

Pemberdayaan masyarakat yaitu sebenarnya mengacu pada kata *empowerment*, yakni sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat

² *Ibid.*, h. 58

lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.³ Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat memberi peranan kepada kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan hanya bebas mengemukakan pendapat saja, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Selain itu juga dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan juga berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.⁴

Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

³ Setiana., *Loc. Cit*

⁴ Suharto, *Loc. Cit*

3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan memengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan, dan sosialisasi.⁵

Maka dari itu, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Dikatakan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai sebuah tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yakni masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan. Serta pemberdayaan sebagai sebuah tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.⁶

Selain itu, pemberdayaan juga dapat dimaknai dalam konteks menempatkan posisi masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang bergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri, dan juga pemberian

⁵ *Ibid.*, h. 59

⁶ *Ibid.*, h. 59-60

pelayanan publik kepada masyarakat tentu merupakan tugas negara secara *given*, sangatlah diperlukan.⁷

Sejak tahun 1970-an “pemberdayaan” menjadi sebuah kado baru dalam pembangunan dan merasuk ke seluruh sektor kehidupan. Pemberdayaan (*empowerment*) dalam perspektif politik sering dimaknai sebagai pemberian kekuasaan, sehingga berdasarkan pemahaman tersebut desentralisasi (pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah) dapat dipandang sebagai kepercayaan pusat terhadap kemampuan masyarakat daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Menurut hemat kami, pemberiaan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah ini lebih bersifat elitis, sehingga yang lebih banyak menikmati adalah para elit daerah, dengan demikian sangat logis kalau kemudian yang muncul adalah raja-raja kecil di daerah. Sementara itu rakyat kecil di daerah tetap dalam kondisi tetap berdaya dan kemakmuran rakyat masih jauh dari harapan. Evaluasi keberhasilan otonomi daerah yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri membuktikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum menyentuh akar permasalahan, yakni ketidak-berdayaan rakyat.

Sementara itu dalam perspektif sosial ekonomi pemberdayaan (*empowerment*) lebih dipandang upaya untuk memberi daya, dan bukan kekuasaan. Gunawan Sumodiningrat (2005) menyatakan bahwa istilah yang tepat bukanlah *empowerment* melainkan *energize* atau memberi energi. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan adalah memberi energi agar rakyat mampu bergerak secara mandiri, sehingga dengan demikian pemberdayaan tidak bersifat mandiri, akan tetapi dari jauh tetap diamati dan terus dijaga agar tidak jatuh lagi. Pembangunan pada hakikatnya adalah transformasi atau perubahan menuju keadaan yang lebih baik, sementara itu pemberdayaan pada hakikatnya adalah pemberdayaan energi agar masyarakat mampu hidup

⁷ Jamaludin, *Loc. Cit*

secara mandiri. Kendati kedua istilah tersebut memiliki tujuan yang sama, namun pendekatan dan strategi yang ditempuh berbeda.⁸

Parsons menyatakan bahwa pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan, yakni:

1. Aras Makro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
2. Asas Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Asas Mikro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungannya yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.⁹

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu, pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan

⁸ Soleh Chabib, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), h. 17-18

⁹ Suharto, *Op. Cit.*, h. 66-67

bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berke sinambungan.

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek yang harus diketengahkan yakni sebagai berikut:

1. Peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan visi dan misi.
2. Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri. Di sini yang mempunyai fungsi dan peran yang

besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat, (LSM) dalam membantu peran pemerintah.

3. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri atau yang sering disebut local community organization. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kulisi, seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat itu sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, dan sebagainya.
4. Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara khusus dinyatakan dalam konstitusi yang paling sesuai untuk membangun ekonomi Indonesia.¹⁰

Salah satu tugas yang menjadi tanggungjawab setiap fasilitator adalah mengkomunikasikan inovasi, dalam rangka mengubah perilaku masyarakat penerima manfaat agar tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya. Dalam hubungan ini, perlu diingat bahwa penerima manfaat pemberdayaan masyarakat sangatlah beragam. Baik beragam mengenai karakteristik individunya, beragam lingkungan fisik dan sosialnya, beragam pula kebutuhan-kebutuhannya, motivasi, serta tujuan yang diinginkannya.

Dengan demikian, tepatlah jika kang Kang dan Song (1984) menyimpulkan tentang tidak adanya satu pun metode yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan menurutnya, dalam banyak khusus, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan dengan menerapkan beragam metode sekaligus yang saling menunjang dan melengkapi. Karena itu, di dalam setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang paling baik sebagai suatu “cara yang terpilih” untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakannya.

¹⁰ Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 16

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir, menyusun gagasan, yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang berkaitan (relevan) dengan maksud dan tujuan secara ringkas metodologi ialah suatu sistem berbuat, oleh karena itu metodologi merupakan seperangkat unsur yang membentuk satu kesatuan.

Kegiatan PKM merupakan kegiatan akademik berbasis pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. PKM adalah sebuah pendekatan pemberdayaan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat. Tahapan Pelaksanaan PKM terdiri dari tujuh tahap, meliputi: *Pertama*, Sosialisasi Awal, Rembug Warga dan Refleksi Sosial. Sosialisasi awal merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam PKM Sisdamas. Dalam tahap ini, masyarakat diberikan kesempatan kesempatan untuk mengambil keputusan.

Rembug Warga merupakan proses awal dari pengejawantahan pembangunan partisipatif, karena masyarakatlah yang berhak untuk menentukan apakah mereka akan melakukan upaya penanggulangan masalah sosialnya sendiri.

Refleksi sosial bertujuan untuk menimbulkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Refleksi sosial memiliki 2 hal penting, yaitu olah pikir dan olah rasa. Olah pikir merupakan proses analisis kritis terhadap permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat untuk membuka mekanisme-mekanisme yang selama ini sering tidak tergalai dan tersembunyi didalamnya. Olah rasa adalah upaya untuk merefleksikan ke dalam terutama yang menyangkut sikap sikap dan perilaku mereka terhadap permasalahan sosial.

Kedua, Pemetaan sosial. Pada tahap pemetaan sosial masyarakat melakukan proses belajar untuk menggali informasi mengenai kondisi nyata dari masalah-masalah yang dikemukakan dan dirumuskan pada saat refleksi

sosial. Selain itu, mengkaji, informasi dan fakta yang sudah didapatkan dianalisa dan dikaji bersama.

Ketiga, Pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap adanya organisasi masyarakat warga yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur yang dipimpin oleh seseorang yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

Organisasi masyarakat yang dibangun berbentuk paguyuban yang memanfaatkan organisasi yang sudah terbentuk seperti Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesia dan sebagainya. Organisasi yang diharapkan menjadi penggerak bagi masyarakat dan mampu menjadi pelaksana terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan.

Kelima, Pelaksanaan program. Pada tahap ini semua pihak terlibat dalam kegiatan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing panitia. Relawan diarahkan oleh pokja untuk mengisi pos-pos seksi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam bentuk sikap gotong royong, jujur, peduli, tanggungjawab dan sebagainya diimplementasikan bersama pada tahap ini. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi baik secara lisan dan tulisan. Secara lisan dapat dilakukan secara *face to face* atau melalui pengumuman pengeras suara milik masyarakat seperti dari masjid atau mushola dengan oleh tokoh masyarakat dan atas persetujuan bersama. Secara tulisan dapat berbentuk surat, leaflet atau spanduk, papan proyek dll Pelaksanaan program perlu diatur ritme keterlibatan partisipan apabila waktu yang dibutuhkan lebih dari satu hari.

Kelima, Monitoring Evaluasi. Pada tahapan ini, organisasi masyarakat memfasilitasi pertemuan warga bersama pemerintahan desa untuk membentuk tim Monev. Kemudian tim melakukan tugas monitoring dan evaluasi dengan mengecek kembali hasil pelaksanaan program disesuaikan

dengan rencana yang terdapat dalam proposal. Hasil temuan monev direkomendasikan kepada organisasi masyarakat untuk bahan tindak lanjut pada program tahun berikutnya. Setelah dipandang selesai tim monev menerbitkan Berita Acara yang menerangkan bahwa pelaksanaan program telah dilaksanakan. Kemudian organisasi masyarakat membubarkan Pokja dan dan tim monev serta membentuk organisasi pemelihara seperti untuk menjaga keberlanjutan program tersebut.

Pemberdayaan pengelolaan ini memiliki konsep berbasis modal sosial. Modal sosial yang pertama kali dikenalkan Robert Putnam menyebutkan bahwa “modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokrasi¹¹. Putnam mendefinisikan *social capital* sebagai suatu *trust*, *norm*, dan *network* yang mempermudah koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan (*mutually coordination*). Modal sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam memahami tindakan/aktivitas suatu kelompok sosial. Keterkaitannya dengan aspek nilai, kepercayaan, dan jaringan. Robert Putnam menekankan bahwa jaringan-jaringan, nilai-nilai dan kepercayaan yang timbul di antara para anggota perkumpulan dapat memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk manfaat bersama.

James Coleman memberi batasan modal sosial sebagai “seperangkat sumber daya yang inheren dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial seorang anak”. Coleman menambahkan bahwa modal sosial merupakan “aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial”¹². Coleman (1999: 14) menyatakan bahwa kerjasama atas kepercayaan tidak lepas dari unsur kekeluargaan/kekerabatan dan non-

¹¹Putnam, Robert. 1993. *Making Democracy Work : CivicTraditions in Modern Italy*. Princeton : Princeton University Press.

¹² James Coleman, 1990, . Halaman 300.

kekeluargaan/kekerabatan. Menurutnya, sebagaimana mengutip Porath, bahwa dalam dalam sistem pertukaran ekonomi terdapat apa yang disebut *F-Connection*. *F-Connection* adalah suatu bentuk hubungan yang dibangun di antara *Families* (keluarga), *Friends* (teman), dan *Firms* (perusahaan). Masing-masing bentuk organisasi sosial ini dapat saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Coleman (1999: 20-23) juga menjelaskan bahwa ada tiga bentuk yang dicirikan oleh *social capital*, yaitu: kewajiban dan harapan atas dasar sifat dapat dipercaya (*obligations and expectations depend on trustworthiness*), kemampuan saluran informasi (*informations channels*), dan norma-norma dengan sanksi yang efektif (*norms and effective sanctions*). Ketiga bentuk *social capital* ini dapat dibedakan dari bentuk-bentuk modal lainnya, seperti modal dana (*financial capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal manusia (*human capital*).

Penjelasan Coleman mengenai *social capital* tampaknya menekankan pentingnya keseimbangan antara kajian ekonomi dan sosiologi sehingga yang mendasari keputusan individu dalam menentukan sesuatu tidak hanya didasarkan pada tujuan ekonomi semata, tetapi juga didasarkan atas tujuan sosialnya. Dengan tujuan berimbang anatara sosiologi dan ekonomi, maka akan terbentuk suatu tujuan mencapai modal manusia (*human capital*) atau yang biasa dikenal dengan sumberdaya. Modal manusia itu sendiri dapat berupa ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu.

Apa yang dikatakan bentuk modal sosial oleh Coleman, dilihat Portes sebagai sumber modal sosial. Sumber itu sendiri, tegas Alijandro Portes (1995), bukan modal sosial. Konsep modal sosial merujuk pada kemampuan Individu untuk memobilisasi sumber-sumber langka terhadap permintaan. Sumber langka tersebut memiliki karakteristik sebagai “hadiah”, sebab sumber tersebut tidak diharapkan untuk dibayar dalam sejumlah uang atau nilai lainnya pada periode masa tersebut. Sumber yang diperoleh lewat

modal sosial tersebut sering mengandung harapan resiprositas pada bentuk yang sama di masa datang. Portes mengajukan 4 sumber modal sosial yaitu niali, solidaritas, resiprositas, dan kepercayaan. Portes (1995:12-13) membatasi modal sosial sebagai “kemampuan individu-individu untuk mengatur sumber-sumber langka tersebut dapat bersifat nyata secara ekonomi seperti potongan harga dan utang bebas bunga, atau tidak nyata seperti informasi tentang kondisi bisnis.

Menurut Portes (1998: 8) bahwa ekspektasi kolektifitas sebagai sumber *social capital* dalam ekonomi dapat dibedakan ke dalam empat tipe, yaitu: (1) *value introjection*, yakni nilai yang memaksa individu untuk berperilaku sesuai dengan perilaku kolektif (2) *the dynamics of group affiliation*, tipe ini menunjukkan bahwa individu tidak diharapkan berperilaku sesuai dengan moralitas kelompok tetapi lebih bersifat sukarela, (3) *bounded solidarity*, yakni suatu tipe yang terbentuk bukan karena pemaksaan nilai-nilai masyarakat atau melalui pertukaran resiprositas, tetapi lebih sebagai reaksi situasional terhadap kondisi yang dihadapi (4) *enforceable trust*, yakni sebagai sumber *social capital* yang berhubungan dengan perbedaan antara rasionalitas formal dan rasionalitas substansif dalam transaksi pasar. Rasionalitas formal dilandasi oleh transaksi yang didasarkan pada norma-norma universal dan berlaku terbuka. Sementara rasionalitas substansif melibatkan obligasi tertentu dalam monopoli maupun semi monopoli yang menguntungkan kelompok tertentu.

Fukuyama dalam bukunya *trust* mengemukakan bahwa *Social capital* harus mengacu kepada kapasitas individu untuk mendapatkan sumber-sumber yang langka dengan memanfaatkan keanggotaannya pada suatu jaringan atau suatu struktur sosial tertentu. Ia (Fukuyama, 1995: 26) mengatakan bahwa “*Social capital is a capability that arises within a community of regular, honest, and cooperative behavior, based on*

commonly shared norms, on the part of other members of that community. (Social capital adalah kemampuan yang muncul dalam suatu komunitas yang normal, jujur, kooperatif, yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku secara wajar pada bagian dari anggota komunitas tersebut).

Dari pendefinisian mengenai kepercayaan dan *social capital* seperti yang dijelaskan Fukuyama di atas, maka kepercayaan tidak lain adalah efek samping yang penting dari norma-norma sosial kooperatif yang memunculkan *social capital*. Kepercayaan muncul dalam komunitas yang saling berbagi norma-norma kejujuran dan kesediaan untuk saling tolong menolong dan oleh karenanya mampu bekerjasama satu dengan yang lainnya. Fukuyama menjelaskan bahwa kerjasama dibentuk melalui dua kategori, yakni seleksi kerabat (*kin selection*) dan resiprositas. Seleksi kerabat meniscayakan adanya perbedaan antara keluarga inti dan keluarga yang semakin besar. Hubungan keluarga, seperti anak-ayah dan adik-kakak, memiliki keterlekatan yang kuat dibanding dengan keluarga yang jauh dan kenyataan ini meniscayakan adanya tingkat altruisme diantara mereka. Sedangkan kerjasama yang berasal dari resiprositas tidak mengharuskan dari seleksi kerabat, tetapi bisa berasal dari non-kerabat, seperti karena hubungan pertemanan, ketetanggan, atau bahkan dari orang lain yang sebelumnya belum pernah diketahui identitasnya.

Resiprositas dilakukan melalui interaksi yang dilakukan secara berulang-ulang dan memerlukan hubungan pendekatan yang cukup lama di antara pihak-pihak terlibat, yang memungkinkan hubungan itu menjadi jelas dan bernilai, bukan atas dasar perilaku oportunistik yang dapat membuat retaknya hubungan. Karena itu untuk menjaga hubungan dalam melakukan kerjasama, maka dilakukanlah kontrak-kontrak di antara pihak-pihak tersebut. Namun demikian batasan kontrak itu sendiri menemui banyak perdebatan. Tetapi dari beberapa substansi perdebatan tersebut muncul dua

kategori kontrak, yakni yang eksplisit dan yang implisit. Kategori kontrak yang pertama sangat menekankan akan adanya bentuk perjanjian yang tertulis, seperti yang dilakukan oleh badan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kategori yang kedua lebih dilandasi oleh unsur kepercayaan, tidak dinyatakan secara tertulis namun hanya menyandarkan pada kejujuran masing-masing pihak, dan kategori yang kedua ini dapat mengarah pada terbentuknya sosialibilitas spontan.

Selain memerlukan pendekatan yang lama, resiprositas juga memerlukan reputasi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Seseorang yang memiliki reputasi akan mendapatkan kemudahan dan pelayanan tersendiri dalam menjalankan aktivitasnya. Karena itu menurut Misztal (1996: 17) bahwa reputasi yang baik akan memunculkan harapan-harapan yang jelas dari yang lainnya, serta memungkinkan untuk melakukan pertukaran, baik barang maupun pelayanan-pelayanan, dengan bentuk rekomendasi-rekomendasi.

Trust akan mampu menekan biaya (*cost*), terutama yang dijalankan dengan kesepakatan-kesepakatan informal. *Trust* akan mampu mengurangi pengurusan biaya kontrak yang berkepanjangan seperti yang dilakukan pada kesepakatan-kesepakatan formal. *Trust* dapat mengurangi resiko yang tidak terduga yang pasti akan dialami oleh setiap orang yang berbisnis. *Trust* juga mampu mengurangi terjadinya pertikaian dan proses hukum yang terjadi akibat adanya pertikaian. Dan *trust* mampu mengurangi biaya dan waktu yang sering dikaitkan dengan sistem pengawasan tradisional (seperti yang ada pada sistem formal) dan kontrak hukum formal. Untuk mengukur tingkat keberhasilan *trust* dalam suatu kerjasama, Fukuyama mengajukan konsep *radius of trust*. Menurut Fukuyama (2002: 71) bahwa konsep *radius of trust* meniscayakan adanya kriteria keberhasilan suatu kerjasama sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kepercayaan yang terbangun di antara pihak-

pihak yang melakukan kerjasama, baik kerjasama atas seleksi kerabat maupun kerjasama atas non-kerabat. Kerjasama akan berhasil bertahan lama jika di dalamnya terbangun derajat kepercayaan (*radius of trust*) tinggi. Yaitu, norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan untuk menolong yang bisa dibagi di antara anggotanya. Sebaliknya ikatan akan mudah hancur bahkan tidak terbentuk sama sekali apabila derajat kepercayaannya (*radius of trust*) rendah. Kepercayaan rendah ditandai dengan sikap mementingkan individu dan saling curiga. Dan tindakan seperti ini dapat dikatakan sebagai penyimpangan sosial (*ipso facto*) yang mencerminkan kurangnya *social capital*.

Fukuyama (1995: 26) mengajukan dua kategori komunitas masyarakat yang dikotomis, yakni komunitas masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan komunitas masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan rendah. Jenis pertama menggambarkan tingkat *trust* yang tinggi dan terus berkelanjutan di bawah otoritas politik yang telah didesentralisasikan pada fase pra-modern. Organisasi kecil yang memiliki banyak relasi dapat memanfaatkan ekonomi sambil menghindari biaya *overhead* dan birokrasi yang membebani organisasi besar. Ekonomi masyarakat yang demikian mempunyai keunggulan fleksibilitas yang tinggi, karena masyarakatnya mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi.

Komunitas yang memiliki kepercayaan tinggi dicontohkan Fukuyama seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Pada negara-negara tersebut masyarakatnya dianggap memiliki kemampuan untuk membuat sosiabilitas spontan yang lebih mengedepankan hubungan-hubungan informal. Sementara kepercayaan rendah dicontohkan pada Cina, Hongkong, dan Taiwan, karena pada negara-negara tersebut masyarakatnya kurang memiliki kemampuan membentuk sosiabilitas spontan yang biasanya cenderung menerapkan hubungan-hubungan dengan aturan-aturan formal. Komunitas

yang memiliki kepercayaan rendah biasanya lebih memilih hubungan primordial daripada membentuk komunitas yang terbuka, seperti komunitas dengan ikatan keluarga yang kuat akan memiliki hambatan untuk mempercayai komunitas dari keluarga lain.

Kepercayaan tinggi (*high trust*) akan memudahkan terbentuknya jaringan. Kemampuan suatu perusahaan untuk bergerak dari hierarki-hierarki besar ke jaringan fleksibel perusahaan-perusahaan kecil akan sangat tergantung pada tingkat kepercayaan dan modal sosial (*trust & social capital*) yang hadir dalam masyarakat luas. Masyarakat berkepercayaan tinggi seperti Jepang dan Jerman berhasil menciptakan berbagai jaringan dengan baik sebelum revolusi informasi memasuki kecepatan yang lebih tinggi. Masyarakat berkepercayaan rendah mungkin tidak akan pernah mampu meningkatkan efisiensi yang ditawarkan teknologi informasi. Karena itu, selain jaringan juga ada norma yang melekat pada masyarakat. Norma boleh jadi merupakan persoalan-persoalan nilai yang mendasar, tetapi norma juga sangat mungkin mencakup standar profesional dan aturan-aturan perilaku seperti kode etik. Seorang dokter bekerja atas dasar kode etik. Begitu pula bagi para pedagang mungkin memiliki aturan-aturan perilaku yang mengikat di antara mereka.

Pemberadayaan masyarakat dapat berangkat dari teori aksi. Teori aksi parson membedakan antara teori aksi dengan aliran behaviorisme. Dipilihnya istilah “action” bukan “behavior” karena menurutnya memiliki konotasi yang berbeda. Istilah action menyatakan tidak langsung suatu aktivitas, kreatifitas, dan proses penghayatan dari individu. Sedangkan behavior secara tidak langsung menyatakan kesesuaian secara meknik antara perilaku (respon) dengan rangsangan dari luar (stimulus).

Dalam analisisnya, parson banyak menggunakan kerangka alat-tujuan (*means-ends framework*). Inti pemikiran Parson adalah bahwa: (1) tindakan

itu diarahkan pada tujuannya (atau memiliki suatu tujuan); (2) tindakan terjadi dalam suatu situasi, dimana beberapa elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak itu sebagai *alat* menuju tujuan itu; dan (3) secara normative tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan. Singkatnya, tindakan itu dilihat sebagai satuan kenyataan sosial yang paling kecil dan paling fundamental. Komponen-komponen dasar dari satuan tindakan adalah tujuan, alat, kondisi, dan norma. Alat dan kondisi berbeda dalam hal dimana orang yang bertindak itu mampu menggunakan alat dalam usahanya mencapai tujuan; kondisi merupakan aspek situasi yang tidak dapat dikontrol oleh orang yang bertindak itu.

Dari semula Parson menjelaskan bahwa teori aksi memang tidak dapat menerangkan keseluruhan aspek kehidupan sosial. Meskipun teori aksi berurusan dengan unsure-unsur yang paling mendasar dari kehidupan sosial namun ia mengakui bahwa unsure-unsur yang paling mendasar bagi kehidupan sosial, namun ia mengakui bahwa unsure-unsur yang mendasar itu tidak berurusan dengan keseluruhan struktur sosial. Dalam positivisme modern, Purdue menyebutkan bahwa sebagai sebuah filsafat yang berasal dari Lingkaran Wina mulai tahun 1920-an, filsafat harus mengikuti prosedur sains. Ini merupakan aliran yang membatasi fikiran pada segala hal yang dapat dibuktikan. Ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan inferensi logis yang berdasarkan fakta yang jelas. Positivisme modern disebut sebagai pohon dari sekumpulan pohon di hutan. Hutannya adalah positivisme. Ia tak hendak menggantikan positivisme. Satu bentuknya adalah neopositivisme atau juga disebut positivisme logik. Jika positivisme berupaya menjawab bagaimana sebuah masyarakat berjalan, neopositivisme berupaya menjawab apa yang seharusnya dilakukan ilmu pengetahuan (science). Ia mengintegrasikan rasionalisme dan empirisme,

memverifikasi melalui riset, lintas ilmu, dan berada pada level yang lebih rendah (*lower range*).

Salah satu derivasi dari pemikiran ini adalah penggunaan matematika dalam sosiologi. Pendekatan ini dalam upaya menemukan teori kausalitas yang baru (*new causal theory*). Contoh yang melakukannya adalah Peter Blau dan Duncan yang melakukan penelitian perubahan struktur pekerjaan antar generasi. Mereka menggunakan 5 variabel untuk menjelaskannya yaitu status pekerjaan responden saat ini, status pekerjaan pada awal berkerja, pendidikan, status pekerjaan ayahnya, serta pendidikan ayahnya.

Pareto membagi tiga jenis tindakan manusia, di antaranya: *Pertama*, kategori tindakan naluriah atau kebiasaan. *Kedua*, tindakan logis (rasional), yakni suatu tindakan berdasarkan ophelimity yang merekonstruksi hubungan antara aktor, sarana dan tujuan. *Ketiga*, tindakan tidak logis (tindakan tidak rasional), di mana aktor percaya bahwa hubungan sarana-tujuan telah ditetapkan secara tidak logis. Mereka bertindak tidak logis, namun mereka percaya bahwa mereka bertindak dengan logis.

Menurut Pareto, bila kita membandingkan masyarakat, kita akan menemukan keseragaman umum (*common uniformities*) dan variasi individu (*individual variation*). Keseragaman dapat dianggap sebagai 'residu' universal dari tindakan manusia dan bisa dibedakan dari 'turunan', variasi kehidupan sosial manusia terkonstruksi secara sosial. Residu diklasifikasikan ke dalam berikut ini: 'naluri kombinasi', kecenderungan untuk mengakui bahwa benda-benda yang berhubungan antara satu dengan lainnya; 'ketekunan agregat', kecenderungan untuk mengakui kelangsungan asosiasi manusia sepanjang waktu, dan 'sosialitas', kecenderungan manusia untuk hidup dalam masyarakat dan untuk mensubordinasikan diri.

Sementara George Homans mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial dan menggunakan sebagian besar waktu mereka berinteraksi

dengan manusia lain. Perilaku sosial merupakan pertukaran aktivitas, nyata atau tidak. Analisis Homans terbatas antara individu dengan individu. Pada tataran lebih tinggi, Teori Pertukaran Peter Blau memahami struktur sosial berdasarkan analisis proses sosial yang mempengaruhi hubungan antara individu dan kelompok. Blau bermaksud menganalisis struktur sosial yang lebih kompleks, melebihi Homans yang memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk kehidupan sosial mendasar. Blau memusatkan perhatian kepada proses pertukaran yang menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun kelompok.

Menurut Blau, mekanisme yang menjembatani antara struktur sosial yang kompleks itu adalah norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Menurutnya konsensus nilai mengganti pertukaran tak langsung dengan pertukaran langsung. Seorang anggota menyesuaikan diri dan mendapat persetujuan implisit karena penyesuaian diri memberikan kontribusi atas pemeliharaan dan stabilitas kelompok. Dengan kata lain, kelompok atau kolektivitas terlibat dalam suatu hubungan pertukaran dengan individu.

Selain itu ada paradigma pluralis. Paradigma pluralisme berisi berbagai teori yang disusun atas pandangan (asumsi) bahwa manusia adalah makhluk rasional, bebas dan memiliki tujuan (*purposive actor*). Manusia, sebagai individu dan masyarakat, merupakan dua objek penting bag titik tolak munculnya paradigma pluralis. Manusia dan kelompok (menjadi masyarakat dalam arti luas) adalah dua hal yang berbeda. Keduanya merupakan objek yang berbeda, meskipun satu objek bisa diterangkan melalui objek lainnya.

Bagi paradigm pluralis, penyimpangan atau deviasi dalam masyarakat merupakan hal yang biasa, tidak dianggap sebagai suatu masalah. Adanya perbedaan yang muncul dalam masyarakat merupakan objek yang menarik perhatian kalangan pluralis. Dunia tidak dipandang

sebagai sebuah *subjective world* sehingga paradigm ini tidak kaku dalam melihat masalah. Bagi paradigm pluralis, masyarakat merupakan realitas sosial, dimana pernyataan kesadaran didasarkan pada ide-ide bersama. Hubungan dalam masyarakat merupakan proses timbal balik dengan berpedoman pada seperangkat gagasan, hukum dan peraturan bersama. Manusia juga dipandang sebagai sosok yang independent, memiliki kebebasan dan otoritas serta otonomi dalam membuat pemaknaan dan menafsirkan atas realitas sosial di sekitarnya. Karena itu, tindakan manusia sulit diprediksi, karena adanya kesadaran yang berbeda antar manusia. Manusia sebagai aktor sosial menafsirkan dunia empiris mereka sendiri secara bebas dan berbeda satu dengan lain.

Tokoh filosof utama yang dijadikan basis paradigma pluralis adalah Immanuel Kant yang menyatakan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang suka berteman sekaligus juga berkompetisi, namun manusia tetap senang dengan harmoni. Manusia bertindak atas kesadaran subyektif, dan memiliki kebebasan menafsirkan realitas di lingkungannya secara aktif.

Sejalan dengan konsep manusia Kant, Rousseau mengembangkan teori kontrak sosial. Dalam teori ini, terbentuknya negara (masyarakat politik) karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara. Sumber kewenangan disini adalah masyarakat itu sendiri.

Dalam paradigma pluralis, manusia merupakan makhluk dengan ciri dualisme yaitu sebagai makhluk sosial (*sociable*) sekaligus berkesadaran secara individu (*self assetive*). Bukannya eksternal tidak mampu menekan manusia, namun perilaku manusia adalah makhluk yang intentional sekaligus voluntary. Kebebasan lebih dimaknai sebagai hal yang personal dan individual, bukan sebagai hal yang kolektif.

Dalam memandang masyarakat, paradigam ini melihat bahwa realitas sosial merupakan dunia yang subjektif, yang dibentuk karena ada ide dan makna yang saling didistribusikan. Karena makna yang dibagi tidak selalu sama, maka yang terbentuk adalah masyarakat heterogen. Resiprositas dalam arti luas merupakan basis relasi dalam masyarakat, dimana tiap orang berorientasi pada orang lain.

Mengikuti filsafat idealisme, tindakan manusia diyakini tidak dapat diprediksi. Karena itulah metode *verstehen* Weber menjadi relevan. Menurut Weber, tiap orang berkesempatan menegosiasikan struktur masyarakatnya sendiri. Tiap individu bisa mengajukan perubahan-perubahan sesuai keinginannya. Mengikuti paradigma pluralis ini, manusia dipandang sebagai interaksionis sekaligus sebagai pribadi khas. Inilah yang dimaksud dengan sifat dualisme. Tekanan-tekanan eksternal tidak begitu saja langsung membentuk sikap-sikapnya, karena ada kekuatan dalam diri si manusia itu sendiri yang tidak tunduk pada tekanan eksternal.

Salah satu teori utama sosiologi yang tergolong menggunakan paradigma pluralis adalah teori Interaksionisme Simbolik. Teori ini dikenal dalam lingkup sosiologi interpretatif yang berada di bawah payung teori tindakan sosial (*action theory*), yang dikemukakan Weber. Intinya, bahwa tindakan sosial bermakna berdasarkan makna subyektifnya yang diberikan individu-individu. Tindakan individu mempertimbangkan perilaku orang lain yang lalu diorientasikan dalam perilakunya sendiri. Kehidupan sosial berjalan atas dua lingkaran: kelompok primer dan sekunder. Relasi sosial berjalan di atas kesadaran masing-masing individu (*self consciousness*). Manusia membagi dengan manusia lain berbagai simbol-simbol yang abstrak baik yang objektif maupun subjektif. Dengan demikian, realitas sesungguhnya adalah realitas yang dibangun secara sosial (*socially constructed*).

Weber menjelaskan dalam *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* berusaha membalikkan tesis Marx yang menyatakan bahwa superstruktur ditentukan oleh infrastruktur (ekonomi). Weber menyatakan bahwa salah satu faktor penting dari perkembangan kapitalis justru terletak pada aspek superstruktur (ideologi dan agama). Weber memperlihatkan bagaimana semangat untuk mencapai kemajuan yang signifikan di kalangan penganut agama kristen protestan daripada katolik. Realitas semacam ini cukup menarik bagi Weber untuk mengkaji peranan agama dalam kemajuan ekonomi.

Georg Simmel, sebagai sosiolog Jerman, berhadapan dengan sosiologi positivistik Comte serta teori evolusi Spencer. Teori Simmel bertolak dari konsep atomisme logis. Masyarakat dipersepsikan lebih sebagai sebuah interaksi individu-individu dibandingkan sebuah interaksi substansial. Ia memfokuskan pada atom-atom empirik, dengan berbagai konsep dan individu-individu di dalamnya, serta kelompok-kelompok yang kesemuanya berfungsi sebagai suatu kesatuan. Masyarakat, pada hakekatnya dapat ditemukan di dalam individu-individu yang melakukan interaksi.

Interaksi merupakan konsep dasar sosiologi, termasuk Simmel. Konsepnya yang mikro menyangkut bentuk-bentuk (forms) di mana interaksi yang terjadi di dalamnya melibatkan berbagai tipe dan ini menyangkut individu yang terlibat di dalam interaksi itu. Kelompok teori yang tergolong sebagai interaksi simbolik juga bertolak dari hal yang paling elemen yakni "relasi". Dalam teori ekologi manusia misalnya, dipelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam tiap jejaring kehidupan berlangsung kompetisi antar makhluk hidup untuk bertahan hidup dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

Bagi Dahrendorf, masyarakat terdiri atas kaum pemilik modal, kaum eksklusif dan tenaga kerja. Hal ini membuat perbedaan terhadap bentuk-

bentuk konflik, dimana Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (*domination*) dan yang dikuasai (*submission*), maka jelas ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan.

Asumsi Dahrendorf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsesus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Bagi Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsesus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.

Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi 'otoritas' selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis.

Coser menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensial positif yaitu membentuk serta mempertahankan struktur suatu kelompok tertentu. Coser tidak mencoba menghasilkan teori menyeluruh yang mencakup seluruh fenomena sosial. Karena ia yakin bahwa setiap

usaha untuk menghasilkan suatu teori sosial menyeluruh yang mencakup seluruh fenomena sosial adalah sesuatu yang sia-sia.

Inti pemikiran Coser tentang konflik, di antaranya adalah: Pertama, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Kedua, seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain.

Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, konflik realistik, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Kedua, konflik non-realistik, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.

Mead mengartikulasikan pentingnya teori "Fikiran (*Mind*), Diri (*Self*), dan Masyarakat" (*Society*). Mead memperkenalkan dialektika hubungan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Bagi Mead, individu merupakan makhluk yang sensitive dan aktif. Keberadaan sosialnya mempengaruhi bentuk lingkungannya secara efektif sebagaimana lingkungannya mempengaruhi kondisi sensitifitas dan aktifitasnya. "Fikiran" dalam konsep Mead adalah fenomena sosial yang muncul dalam proses sosial. Demikian pula dengan "diri" (*self*). Diri dapat bersifat sebagai objek maupun subjek secara sekaligus. Ia merupakan obyek bagi dirinya sendiri, dan ini merupakan karakter dasar yang membedakan manusia dengan

hewan. Dalam hal ini diri akan mengalami proses internalisasi atau interpretasi subyektif atas realitas struktur yang lebih luas. Dia merupakan dialektis dari “I”-impulsif dari diri, aku sebagai subyek-dan “Me”-sisi sosial dari manusia, aku sebagai obyek.

Sebagaimana tradisi pluralisme, Berger meyakini bahwa sosiologi mesti mempelajari gejala sosial yang sarat makna oleh aktor yang terlibat dalam gejala sosial tersebut. Dalam bukunya *The Social Construction of Reality*, Berger pada hakekatnya berupaya menyusun teori tentang masyarakat dengan memahami pengetahuan sebagai produk historis yang dikonstruksi secara sosial. Masyarakat sebagai realitas sekaligus sebagai entitas subjektif dan objektif.

Menurut Berger, hubungan antara individu-individu dan institusi-institusi adalah suatu dialektis (interaktif) yang diekspresikan dalam sebuah bentuk dengan tiga kondisi: Masyarakat adalah suatu produk manusia (*society is a human product*). Masyarakat adalah sebuah realitas objektif (*society is an objective reality*). Manusia adalah sebuah produk sosial (*Man is social product*) yang menunjukkan adanya realitas subjektif dalam diri aktor. Sementara masyarakat adalah realitas obyektif.

Peter Berger dan Thomas Luckmann (1967) berikhtiar memperdamaikan pertentangan antara paradig fakta sosial dan definisi sosial. Menurut Ritzer (2007 : 115) karya mereka *The Social Construction of Reality*, paling berpengaruh dalam teori sosiologi dewasa ini. Dari judulnya saja orang akan terkesan bahwa pengarangnya termasuk penganut paradig definisi sosial. Meskipun buku itu condong ke paradig definisi sosial, namun sebagian besar upaya mereka juga ditujukan untuk memperdamaikan kecenderungan penekanan yang berlebih-lebihan oleh satu paradig dengan mengorbankan aspek paradigma lain.

E. Metode Pemberdayaan

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir, menyusun gagasan, yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang berkaitan (relevan) dengan maksud dan tujuan secara ringkas metodologi ialah suatu sistem berbuat, oleh karena itu metodologi merupakan seperangkat unsur yang membentuk satu kesatuan.

Namun demikian metode yang diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan ini adalah menggunakan metode sisdamas yang dikembangkan tim LP2M Universitas Islam Negeri Bandung.

Dalam melaksanakan kegiatan ini dilakukan metodologi sebagai berikut: Pertama, Persiapan. Dalam persiapan dilakukan pengumpulan data awal mengenai apa yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran kegiatan ini. Apa pun informasi yang dapat meningkatkan tujuan keberhasilan kegiatan ini akan dikumpulkan dan ditindaklanjuti. Kedua, Pelaksanaan teknis. Dalam kegiatan ini melibatkan semua komponen civitas akademika. Pelaksanaan ini juga akan dilakukan perumusan mengenai peran apa yang dapat dilakukan satuan-satuan kerja di lingkungan LP2M UIN. Ketiga, keluaran yang dihasilkan. Keluaran yang dihasilkan berupa terselenggaranya kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di lingkungan Kampus LP2M UIN SGD Bandung

Dalam kegiatan ini, panitia akan membuat laporan, yakni: Pertama, laporan pendahuluan, dibuat pada awal pelaksanaan pekerjaan yang memuat dasar pemikiran, dasar hukum, maksud dan tujuan, lingkup kegiatan, *out come* dan *out put* kegiatan, bentuk dan lokasi kegiatan. Kedua, laporan kemajuan (*progress report*) yang dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan yang memuat memuat dasar pemikiran, dasar hukum, maksud dan tujuan, lingkup kegiatan, *out come*

dan *out put* kegiatan, bentuk dan lokasi kegiatan serta pelaksanaan kegiatan yang menyebutkan penyelenggara dan penyelenggaraannya (proses kegiatan). Ketiga, laporan akhir, disampaikan pada akhir pelaksanaan pekerjaan. Pada laporan akhir ini, pelaksana kegiatan menyertakan semua bukti kegiatan baik yang menyangkut materi maupun finansial.

F. Lama Program

Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui ini dilakukan selama 2 bulan

G. Rencana Kerja

No	Periode Aktivitas	Kegiatan
1	Minggu 1 & 2 (periode pertama)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan diskusi dengan masyarakat untuk merumuskan perencanaan kegiatan. ▪ Melakukan pemetaan pemberdayaan masyarakat
2	Minggu 3 & 4) periode kedua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan asistensi pada masyarakat untuk merumuskan perencanaan kegiatan. ▪ Melakukan kegiatan dengan pengembangan model kelembagaan
2	Minggu 5 & 6 (periode ketiga)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kegiatan dengan pengembangan model pemberdayaan dan social capital

2	Minggu 7 & 8 (Periode keempat)	<ul style="list-style-type: none">▪ Membangun koordinasi para pelaksana program pemberdayaan masyarakat.▪ Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi
---	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. Sumber Pendanaan

Sumber dana untuk membiayai kegiatan ini berasal dari Anggaran LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Gambaran umum Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Desa Cidenok merupakan sebuah Desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Desa ini terletak di sebelah timur laut ibu kota Kabupaten Majalengka dengan jarak kurang lebih 32 KM. luas wilayah Desa Cidenok adalah 426,83 Ha yang terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT). Meski masuk dalam wilayah Kabupaten Majalengka, tetapi karena Desa Cidenok berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Cirebon maka mayoritas masyarakatnya berasal dari suku Cirebon dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Cirebon & Dermayon. Batas-batas Desa Cidenok adalah sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lojikobong, Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Kayen (Desa Susukan), Desa Tangkil, Desa Budur dan Panjalin Lor, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kudasari, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bongas Wetan.

Desa Cidenok merupakan wilayah dataran rendah dengan rata-rata mata pencaharian penduduknya dalam bidang pertanian. Keadaan serta penggunaan lahan di Desa Cidenok adalah sebagai berikut: Untuk pertanian: 328,5 Ha, Untuk pemukiman: 78,1 Ha, Untuk tanah kuburan: 10,75 Ha, Untuk tanah lapangan: 6,9 Ha, dan untuk kantor pemerintahan: 2,58 Ha.

Jumlah Penduduk Desa Tahun Terakhir berdasarkan data dari Profil Desa Tahun 2011 adalah: 3366 Jiwa yang terdiri dari 1133 Kepala Keluarga. Secara terperinci dapat diuraikan berikut ini: Jumlah Jiwa yang bermukim di RW 01 adalah berjumlah 436 Jiwa yang terdiri dari 204 penduduk laki-laki

dan 232 penduduk perempuan. Di RW 02 adalah berjumlah 489 Jiwa yang terdiri dari 240 penduduk laki-laki dan 249 penduduk perempuan. Di RW 03 adalah berjumlah 756 Jiwa yang terdiri dari 367 penduduk laki-laki dan 389 penduduk perempuan. Di RW 04 adalah berjumlah 608 Jiwa yang terdiri dari 296 penduduk laki-laki dan 312 penduduk perempuan. Di RW 05 adalah berjumlah 570 Jiwa yang terdiri dari 292 penduduk laki-laki dan 278 penduduk perempuan. Di RW 06 adalah berjumlah 507 Jiwa yang terdiri dari 247 penduduk laki-laki dan 260 penduduk perempuan. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Cidenok adalah berjumlah 3366 Jiwa yang terdiri dari 1646 penduduk laki-laki dan 1720 penduduk perempuan. Data ini diambil dari sumber: Data Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2012.

Sesuai dengan penggunaan lahan yang ada di Desa Cidenok, maka areal lahan yang ada selain digunakan untuk pemukiman warga juga digunakan sebagai lahan pertanian. Tapi itu semua bukan berarti semua warga Desa Cidenok bermata pencaharian bertani. Bahkan warga yang mata pencahariannya bertani masih sedikit dibanding warga dengan mata pencaharian sebagai buruh. Buruh disini bisa dalam bidang pertanian, industri, perdagangan atau jasa. Untuk lebih jelasnya tentang jenis mata pencaharian penduduk Desa Cidenok adalah sebagai berikut: Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 248 orang, sebagai Buruh Tani berjumlah 315 orang, sebagai peternak berjumlah 35 orang, sebagai buruh serabutan berjumlah 176 orang, sebagai pedagang berjumlah 335 orang, sebagai PNS/TNI/POLRI berjumlah 38 orang, sebagai montir berjumlah 4 orang, dan untuk mata pencaharian lainnya berjumlah 354 orang. (Sumber: Profil Desa Tahun 2011).

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Desa Cidenok terbagi atas beberapa strata pendidikan. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat pendidikan penduduk Desa Cidenok adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk yang belum bersekolah adalah 42 orang, jumlah penduduk yang tidak bersekolah adalah 265 orang, yang tidak tamat SD berjumlah 641 orang, yang tamat SD berjumlah 937 orang, yang tamat SMP berjumlah 168 orang, yang tamat SMA berjumlah 89 orang, Diploma berjumlah 8 orang dan Sarjana 10 orang. (Sumber: Profil Desa Cidenok Tahun 2011)

Desa Cidenok mempunyai luas wilayah 246,064 Ha merupakan salah satu dari 11 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Sumberjaya. Desa Cidenok terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, 16 (Enam Belas) RW dan 45 (Empat Puluh Lima) RT. Memiliki penduduk sebanyak 8.339 jiwa atau 2.359 Kepala Keluarga yang terdiri dari 4.299 orang laki-laki dan 4.040 orang perempuan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan, sehingga pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, baik sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk di Desa Cidenok, diantaranya :

- a. *Faktor fisiografis*, bahwa penduduk selalu memilih tempat tinggal yang baik, strategis, tanah subur, relief baik, cukup air dan daerah aman.
- b. *Faktor biologi*, karena adanya perbedaan tingkat kematian, tingkat kelahiran dan angka perkawinan.
- c. *Faktor kebudayaan dan teknologi*, bahwa daerah yang masyarakatnya maju, pola berfikirnya bagus, dan keadaan pembangunan fisiknya maju, maka akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah terbelakang.

Desa Cidenok memiliki penduduk dengan mayoritas pekerjaannya adalah wiraswasta. Oleh karena itu, di Desa Cidenok terdapat banyak Usaha

Kecil Menengah (UKM) dengan omset penjualan yang cukup besar. Desa Cidenok memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang didominasi oleh masyarakat berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Tingkat kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan masih rendah. Hal tersebut disebabkan adanya pemikiran bahwa bekerja untuk mencari uang jauh lebih penting dibandingkan mencari ilmu dalam pendidikan formal.

Kondisi Sosial Masyarakat Cidenok selalu berkembang dinamis sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Perubahan memang tak semudah membalikkan telapak tangan tetapi juga tak sesulit yang kita bayangkan seandainya kita benar – benar mempunyai kemauan untuk merubahnya. Dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia yang semakin lama semakin menuju kemunduran, kita sebagai mahasiswa yang mempunyai peran aktif harus mempunyai ide kreatif dan komitmen yang pasti untuk membuat perbaikan – perbaikan itu, mengingat peran kita sebagai agent of change.

Masyarakat memiliki harapan dan sah – sah saja untuk semua orang. Tetapi selain kita mempunyai mimpi, seseorang hendaknya mempunyai suatu komitmen yang pasti untuk mewujudkannya. Jangan hanya bermimpi kalau ingin berubah tapi lakukanlah mimpi itu agar dapat berubah. Dan kini saatnya peran – peran kita sebagai seorang mahasiswa dibutuhkan untuk menciptakan perubahan itu. Seperti kata – kata dalam sebuah film, ”Seribu orang tua memang mampu mengubah Indonesia, tetapi satu pemuda saja mampu mengubah dunia”.

Berbagai kegiatan dapat kita lakukan untuk perubahan, salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai wadah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat di pedesaan maupun daerah terpencil yang alokasinya kurang mendapatkan sorotan dari luar daerahnya. Kegiatan yang dilakukan bertujuan agar daerah – daerah tersebut dapat lebih baik dari

sebelumnya. Sehingga daerah – daerah itu mampu bersaing dan menciptakan ketrampilannya.

Dalam pengabdian, civitas akademika memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang diperoleh dari proses belajar di Universitas untuk membantu masyarakat di daerah itu. Dalam hal ini, cara yang dilakukan berupa:

1. Para dosen dapat memberikan bantuan – bantuan pelayanan sosial yang dimiliki dengan baik agar mampu meningkatkan kemampuan masyarakat local dalam mengelola modal social yang mereka miliki.
2. Mengenalkan budaya – budaya masyarakat.
3. Pembinaan ketrampilan tertentu dan pendidikan moral untuk masyarakat.

Di sini kita harus menyadari bahwa pengabdian kepada masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk kesinambungan dan keseimbangan suatu kelompok masyarakat yang kiranya tertinggal. Apapun yang kita berikan, entah itu dalam jumlah sedikit maupun besar, semua akan mempengaruhi kemajuan suatu daerah itu. Ilmu – ilmu dan ketrampilan yang kita miliki dapat kita salurkan agar masyarakat dapat merasakan apa yang kita rasakan di kota besar. Masih banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat guna meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia yang ada yang belum mempunyai ketrampilan – ketrampilan tertentu menjadi tenaga yang produktif di bidangnya. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan masyarakat – masyarakat di pedesaan maupun daerah terpencil dapat sedikit terbantu serta diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Mimpi dan komitmen serta kerja keras yang dilakukan dalam mengabdikan untuk masyarakat tidak akan terbuang sia – sia dan akan mempengaruhi sedikit perubahan di negeri ini. Kesalahan dan pengalaman di masa lalu akan menjadi sebuah pembelajaran agar ke depannya kita sebagai pemuda dapat benar – benar mengubah bangsa ini jauh dan jauh lebih hebat dari sekarang.

B. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian mencakup: pertama, Pengembangan daya (capacity building dan capital building). Kedua, Pengembangan kemandirian (self reliance, independence). Ketiga, Pengembangan kesadaran akan kepentingan/kebutuhan. Keempat, Pengembangan kemampuan bertindak secara terorganisasi (sociability).

Pengabdian individu amat penting tetapi tidak cukup, karena suatu masyarakat bukanlah sekedar penjumlahan dari individu-individu tetapi merupakan suatu system (satuan yang terdiri dari unsure-unsur yang saling terkait secara fungsional), suatu system memiliki ciri, sifat, logika, pola perilaku tersendiri yang berbeda dari unsur-unsur yang membentuknya. Jadi suatu system social memiliki karakter yang berbeda dari sifat-sifat individu yang ada didalamnya. Kesuksesan individu belum tentu bisa memperbaiki kondisi individu lainnya serta masyarakat/komunitasnya.

Keluarga: adalah suatu unit social terkecil, semua orang terikat disini. Tetapi keluarga memiliki suatu ikatan yang khas yakni “hubungan perkawinan dan hubungan darah”, sehingga unit ini memerlukan suatu pendekatan yang khusus. Keluarga bukan organisasi publik, jangkauan pemerintah untuk mengintervensi keluarga tidak terlalu besar karena keluarga ini memiliki otonomi yang besar dan amat terikat dengan adat istiadat yang berlaku. Karena ikatan yang amat mendasar dari keluarga,

maka keberhasilan untuk memberdayakan suatu keluarga belum tentu menghasilkan pengabdian pada masyarakatnya. Namun sebaliknya pengabdian keluarga amat dipengaruhi oleh pembangunan masyarakat disekelilingnya.

Komunitas: merupakan unit social yang berada diantara keluarga (yang bersifat emosional , personal, khas, tertutup dan eksklusif) dengan masyarakat luas (yang amat kompleks, impersonal dan longgar hubungan sosialnya). Karena berada diantara dua ekstrim (yang ikatan sosialnya masih relatif personal, emosional, inklusif dsb) tetapi tingkat rationalitas lebih tinggi, maka komunitas menjadi unit pembangunan partisipatif yang amat strategis. Oleh karena itu pendekatan pembangunan yang berbasis pada rakyat selalu menekankan pada pendekatan yang berakar pada komunitas.

Masyarakat: adalah unit sosial yang amat luas dan kompleks serta amat impersonal. Individu cenderung merasa “terasing” (alienated) dan tidak berdaya di masyarakat. Pembangunan masyarakat yang efektif adalah melalui sel-selnya yang lebih kecil yaitu komunitas. Masyarakat mengandung unsur-unsur “civil society” yaitu kekuatan-kekuatan terorganisir yang memiliki kesadaran untuk menyeimbangkan hak, kewajiban dan peran warga negara terhadap kekuatan politik pemerintah/negara maupun kekuatan pasar. CS perlu juga dianalisis dan diberdayakan karena kekuatan-kekuatan inipun tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang dapat menghambat pembangunan serta pengabdian seluruh masyarakat.

Pemerintah/ birokrasi: Komponen yang termasuk disini adalah pemerintah eksekutif dan legislative (DPR/DPRD). Pemerintah adalah bagian dari pelaku pembangunan, karena itu perlu juga diberdayakan.

Mana yang paling strategis untuk dikembangkan?: Ketiganya strategis untuk dijadikan satuan pembangunan, tetapi komunitas spatial lebih perlu

dikembangkan karena komunitas ini bersifat “universal dan mencakup berbagai golongan masyarakat tidak membedakan antara suku, agama dsb.

Mengapa perlu pembangunan komunitas? Konsep otonomi daerah secara politis ditujukan untuk mewujudkan demokrasi dengan memperkuat kemampuan politik daerah untuk mengatur diri sendiri demi tercapainya kemandirian daerah dan memelihara integrasi nasional. Secara administratif otonomi bertujuan untuk: penguatan kemampuan dan peran birokrasi dan pemerintahan personel daerah. Secara sosiologis penguatan pemerintah daerah saja tidak cukup, karena hal ini bisa saja memindahkan dominasi Pusat ke daerah sehingga demokrasi yang sebenarnya tidak terjadi. Oleh karena itu pengembangan otonomi daerah perlu dilengkapi dengan usaha pengembangan *autonomous society* yaitu masyarakat yang lebih mandiri. Satu-satunya jalan menuju hal itu adalah dengan pendekatan Pembangunan Berbasis Komunitas atau *Community Based Development (CBD)*.

Perbedaan antara CD dan CBD: *Community Development*: menunjuk pada suatu (kasus) kegiatan pembangunan di suatu komunitas. Belum tentu kasus ini menjadi pola untuk komunitas lainnya. *Community Based Development*: menunjuk pada suatu konsep/pendekatan pembangunan yang menjadikan komunitas sebagai satuan/ unit pembangunan yang melandasi (menjadi basis) dari seluruh kegiatan pembangunan tersebut. Berdasar pendekatan ini, semua peraturan yang berhubungan dengan pembangunan harus ditujukan untuk pengabdian komunitas (misalnya organisasi komunitas diberi peran yang berarti, komunitas diberi wewenang dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dana secara mandiri, komunitas diberi hak mengelola sumberdaya fisik di lingkungannya dsb.). Jadi yang perlu dikembangkan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat adalah konsep *Community Based Development (CBD)*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pengabdian komunitas. Community needs: kepentingan seluruh komunitas (bukan individu atau keluarga tertentu) yang terkait dengan kondisi khas komunitas tersebut. Oleh karena itu CBD harus dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan komunitas (Community needs assessment). Azas Partisipasi: yaitu keikutsertaan seluruh warga komunitas dalam berbagai dimensi: mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan, menyampaikan aspirasi, merencanakan, menjalankan pembangunan, mengevaluasi dan memonitor, merasakan hasilnya. Untuk melakukan identifikasi kebutuhan komunitas secara partisipatif, misalnya dapat dilakukan teknik : Participatory Rapid Appraisal (PRA). Social capital: adalah stok kepercayaan social, norma dan jejaring yang tersedia didalam suatu kelompok, komunitas atau masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat tsb. untuk memecahkan masalah bersama. Cultural capital: adalah segala kekayaan budaya (nilai-nilai, tradisi, gaya hidup, kemampuan dan ketrampilan bahasa, seni) yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu kepentingan. Political capital: adalah segala hak, wewenang politik, organisasi politik serta organisasi massa yang tersedia di masyarakat serta struktur masyarakat dan kemampuan berorganisasi warga masyarakat yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan politik masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah. Physical capital: kekayaan alam yang ada dilingkungan masyarakat/komunitas. Human Capital: segala bakat, kesehatan, inteligensia, kemampuan fisik, pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki oleh seorang individu yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kepentingannya. Local knowledge atau Local wisdom: segala pengetahuan atau kebijaksanaan yang telah lama terkumpul dan diwariskan didalam masyarakat. Kebijaksanaan dan pengetahuan ini telah terbukti dapat memecahkan masalah-masalah local sehingga perlu dipelajari

dan tidak serta merta digantikan oleh pengetahuan atau kebijakan pemerintah yang baru. Sense of unity atau Community Spirit: suatu semangat kebersamaan yang mengikat warga komunitas. Ikatan ini memiliki akar tertentu. Dalam rangka melakukan pengabdian atau pembangunan komunitas, akar ini harus diperhatikan dan tidak boleh tercerabut. sense of the linkages (interrelationship): adanya perasaan saling terkait dan saling membutuhkan sehingga menciptakan pola hubungan social yang harmonis dan kuat. Community identity: adalah suatu benda, nama, symbol, sejarah, keturunan dsb. yang dapat menghasilkan rasa identitas yang sama dari para warga komunitas. Dengan demikian menghilangkan identitas suatu komunitas dengan cara penyeragaman adalah dapat merugikan eksistensi suatu komunitas.

- Program-program pengembangan komunitas di masa lalu sebagian besar berada di tangan pemerintah melalui kantor PMD. Karena tugas pemerintah selalu bersifat makro dan mencakup seluruh kota, maka pendekatan yang dipergunakan selalu bersifat instruktif-deterministik, cenderung menyeragamkan, kurang fleksibel menjawab tantangan atau dinamika masyarakat yang selalu berkembang, sehingga sering mematikan inisiatif masyarakat dan akibatnya hampir selalu tidak mendapat dukungan rakyat.
- Di lain pihak LSM-LSM yang bergerak di bidang pengembangan komunitas cenderung lebih fleksibel, partisipatif dan memberdayakan tetapi hanya mampu memusatkan perhatian pada suatu daerah binaan tertentu (mikro) dan tidak mampu menciptakan “dinamika” komunitas dalam skala kota (makro).
- Sejalan dengan paradigma “People Centered Development” serta “Reinventing Government “, yang menekankan bahwa tugas pemerintah adalah memberi daya (empowering, enabling) dan

memberi kemudahan (facilitating), maka diperlukan suatu lembaga pengembangan komunitas yang mampu mensinergikan kekuatan pemerintah dan masyarakat (civil society) dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan konsep pengabdian seluruh komunitas kota secara sistemik, sehingga menciptakan dinamika kehidupan komunitas pada skala kota (makro societal).
- b. Mampu menciptakan program-program pengabdian bagi semua komunitas yang membutuhkan secara fleksibel dan tidak bersifat menyeragamkan serta instruktif.
- c. Mampu menghimpun pemikiran dan dana baik dari Pemerintah maupun dari pihak swasta dan LSM – LSM dari dalam dan luar negeri (sehingga tidak tergantung sepenuhnya dari anggaran Pemda).

Alat terpenting untuk pengabdian masyarakat adalah organisasi , artinya masyarakat harus tergabung dalam suatu organisasi dan melalui organisasi itulah aspirasi masyarakat diperjuangkan secara bersama-sama. Melalui organisasi pula seluruh potensi warga masyarakat dapat di sinergikan sehingga menghasilkan “social energy” yang lebih besar dan lebih kuat. Pemerintah wajib memberikan hak hidup, memfasilitasi organisasi tersebut dan memberikan “power share” yang memadai. Dalam rangka pengembangan komunitas, semua warga sebaiknya tergabung dan aktif terlibat dalam organisasi komunitas.

Yang termasuk dalam organisasi komunitas adalah:

- a) Organisasi Resmi Sponsor Pemerintah, misalnya : RT, RW, Pihak Kelurahan, LKMD, Karang Taruna, KSU, dsb.

- b) Organisasi Akar rumput, misalnya: Arisan, Organisasi Pemuda, Lembaga Keuangan, Majelis Taklim, Perkumpulan Doa dsb.

Kedua jenis organisasi tersebut perlu memperoleh hak hidup. Di Cidenok organisasi komunitas yang bersifat primordial seperti perkumpulan keagamaan, organisasi kedaerahan atau, kesukuan telah berkembang relatif baik karena adanya rasa keterikatan yang kuat, demikian pula organisasi komunitas okupasional (Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Pengusaha dsb.), sedang organisasi spatial (misalnya RT/RW) justru mengalami krisis yang cukup parah. RT dan RW praktis hanya menjadi perpanjangan birokrasi kelurahan tanpa rasa ikut memiliki dari warganya. Masyarakat Cidenok menjadi “atomistic” secara spatial. Potensi intelektual, material dan finansial “elit lokal” di tingkat RT/RW tidak dapat dimanfaatkan bagi pembangunan komunitas karena organisasi tersebut tidak mampu menggerakkan partisipasi warganya.

Tindakan paling mendasar untuk memberdayakan komunitas di Cidenok adalah dengan cara: membenahan “politik lokal” yaitu:

- Perlu dilakukan pemilihan ulang ketua RT/RW di seluruh Cidenok, karena pemilihan pada masa ORBA tidak berjalan secara demokratis dan transparan. Pemilihan ulang ini dapat memiliki beberapa efek sampingan yang menguntungkan bagi pengabdian RT/RW di Cidenok yaitu:
 - 1) ketua RT/RW yang tidak didukung warga dapat disingkirkan.
 - 2) kesempatan bagi warga Cidenok untuk memilih secara lebih demokratis ketua RT/RW yang benar-benar memiliki kepemimpinan dan kemampuan untuk menggerakkan warganya untuk pembangunan komunitas mereka.

3) Membangkitkan kesadaran warga Cidenok dari semua tingkatan bahwa organisasi RT/RW adalah penting bagi mereka.

- Sejauh mungkin organisasi komunitas tidak bersifat eksklusif SARA dan tidak bersifat politis tetapi bersifat kekeluargaan.
- RT/RW harus diberi peran lebih banyak sebagai unit pelaksana pembangunan, yaitu dengan memberi kesempatan untuk melakukan sendiri pembangunan fisik di wilayahnya .
- Semua warga RT/RW menjadi anggota secara otomatis (termasuk yang tak ber KTP tetapi punya ijin/penjamin).
- Semua kepemimpinan komunitas dipilih secara periodik melalui “pemilihan lokal” yang terjadwal resmi oleh Pemda.
- Pemda dan Kelurahan berperan sebagai fasilitator dan enabler didalam proses pembangunan ditingkat RT/RW .
- Para calon ketua RT/RW tidak boleh menggunakan atribut dan identitas politik, agama, suku, ras, dsb, tetapi “pribadi”. (kwalitas ketokohan di komunitasnya).
- Kampanye tidak bersifat politis tetapi kekeluargaan. (berlandaskan pada “community spirit”).
- Prosedur pemilihan ketua RT : ketua RT dipilih langsung oleh warga dengan prosedur teknis yang ditentukan sendiri oleh warga RT. Prosedur pemilihan ketua RW :ketua RW dipilih melalui pemungutan suara ketua-ketua RT.

Setelah komunitas diberdayakan dengan mekanisme yang disebut diatas, maka untuk mengisi dan melestarikan pengabdian tersebut, komunitas harus diberi peran nyata dan aktif dalam “tugas Pembantuan” yang menurut UU 22 th. 99 adalah tugas pembangunan yang dipercayakan pada Pemerintahan Kelurahan oleh Propinsi dengan disertai pembiayaan, sarana,

prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada propinsi.

Walaupun tugas tersebut diserahkan pada pemerintahan kelurahan tetapi melalui perjuangan Pihak Kelurahan sebagian tugas tersebut dapat diserahkan pada RT/RW untuk dilaksanakan secara lebih mandiri dan partisipatif. Tugas yang bisa diserahkan misalnya “Tribina” (bina fisk, ekonomi dan sosial).

Dengan pemberian tugas dan wewenang pembangunan yang makin banyak untuk tingkat RT dan RW maka organisasi ini akan memiliki legitimasi yang besar dikalangan warganya, karena benar-benar mengurus pembangunan dan hajat hidup orang-orang yang tinggal di komunitas tersebut. Dalam kondisi yang seperti ini warga elit local (kelas menengah dan atas di RT/RW yang biasanya melecehkan keberadaan organisasi RT/RW akan menghargai dan ikut berpartisipasi dalam urusan organisasi tersebut.

C. Pelaksanaan Pendampingan Keagamaan

Dalam tahapan pengabdian, kegiatan awal yang dilakukan adalah dengan sosialisasi ke anak-anak yang bersekolah di Madrasah Diniyah Miftahul Huda. Dalam sosialisasi itu kami diberi gambaran bahwa metode ajar yang digunakan adalah Iqra, Juz ‘Ammah dan Tajwid. Hari pertama bertemu, penulis belum menerapkan metode yang ingin penulis gunakan. Karena penulis telah menyiapkan tiga metode yaitu metode iqro, metode tahfidz dan metode cerita kisah dalam al-Qur’an. Penulis ingin terlebih dahulu membaca psikologi objek dalam pengabdian, setelah diteliti di dua tempat pengajian dengan melihat tingkah laku anak-anak, penulis mencoba memutar otak memikirkan sebab-akibat apabila penulis menerapkan salah satu dari tiga metode itu.

Akhirnya penulis memutuskan untuk menggunakan metode cerita kisah al-Qur'an untuk pembelajaran al-Qur'an karena melihat kebanyakan anak-anak yang mudah jenuh dengan hafalan dan untuk metode iqro sendiri mereka sudah mampu untuk menguasainya.



Tahapan dalam pembelajaran, anak-anak terlebih dahulu satu persatu membaca surat atau ayat-ayat yang ingin mereka baca dengan disimak dan dibenarkan makharif al-hurf, lalu penulis mulai membuka dengan pertanyaan-pertanyaan ringan seperti siapa yang kenal dengan nabi Muhammad? Lalu bercerita tentang nabi Muhammad, surat yang berkaitan dengannya dan membacakan ayat beserta artinya dalam setiap penggalan cerita, menarik dongeng-dongeng yang memiliki nilai moral yang sama dan terakhir penulis memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memaparkan kembali apa

yang mereka dengar, mengajukan pertanyaan juga mereka memberikan komentar pada setiap tokoh yang diceritakan.

No	Kelas	Umur
1.	2 SD	8 Tahun
2.	2 SD	8 Tahun
3.	4 SD	10 Tahun
4.	3 SD	9 Tahun
5.	4 SD	10 Tahun
6.	3 SD	9,5 Tahun
7.	5 SD	11Tahun
8.	5 SD	10 Tahun
9.	TK	5 Tahun
10.	TK	6 Tahun
11.	TK	6 Tahun
12.	TK	6 Tahun
13.	TK	6 Tahun
14.	TK	6 Tahun
15.	2 SD	8 Tahun
16.	1 SD	7 Tahun

17.	TK	5 Tahun
18.	2 SD	8 Tahun
19.	1 SD	7 Tahun
20.	2 SD	8 Tahun

Hasil pengabdian kepada masyarakat khususnya anak-anak di pengajian tajug guru Hanura dan masjid al-Ikhlas melalui Pembelajaran al-Qur'an dengan metode cerita selain melatih anak untuk berimajinasi juga dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berbicara karena setiap selesai bercerita kami selalu bertanya nilai-nilai atau kesimpulan yang mereka dapat dari hasil mendengarkan cerita, juga memberikan pengetahuan kepada anak tentang tokoh-tokoh dan perilaku manusia yang disebutkan dalam al-Qur'an minimal anak-anak di pengajian tajug guru Hanura dan masjid al-Ikhlas sudah mengenal siapa Nabi Muhammad, paman-pamannya, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Isma'il, sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang munafik dan sifat-sifat orang kafir. Sudah dapat mengetahui beberapa nama surat al-Qur'an beserta artinya dan kisah-kisahannya, membantu proses peniruan perbuatan baik tokoh dalam cerita juga sebagai media penyampaian pesan atau nilai moral dan nilai agama yang efektif karena sedikit demi sedikit mereka sudah dapat mengontrol emosi dalam pergaulan, juga mengetahui agama-agama yang dilegalkan di Indonesia sehingga mulai tumbuh rasa toleransi beragama, dengan metode bercerita juga dapat menyalurkan dan menegembangkan emosi, memberikan dan memperkaya pengalaman batin juga dapat menggugah minat baca anak terhadap al-Qur'an walaupun minimal membaca al-Qur'an terjemahan ataupun Juz 'Amma terjemahan.

Meskipun terdapat beberapa kendala dan hambatan, bukan berarti tidak ada faktor pendukung. Justru banyak terdapat faktor pendukung sehingga program ini dapat terealisasi.

Beberapa faktor pendukung diantaranya:

- a. Respon yang sangat baik dari kepala sekolah SDN Sumberjaya 1 dan TK. Budi Mulia, sehingga kami tak sungkan untuk mensosialisasikan pengajian rutin selama satu bulan di tajug guru Hanura dan masjid Al-Ikhlas.
- b. Respon yang sangat baik dari masyarakat dan orang tua murid karena ada pengajian yang dekat dengan rumah sehingga untuk malam hari anaknya tidak harus mengaji ke desa tetangga yang jaraknya lumayan jauh.
- c. Respon yang sangat baik dari Pak Guru Hanura dan DKM masjid Al-Ikhlas yang bersedia meminjamkan tajug dan masjid sebagai sarana kami dalam pengabdian.
- d. Kesadaran anak-anak untuk mengaji dan semangat dari orang tua yang mengizinkan anaknya mengaji bersama kami. Setidaknya pengajian ini menjadi pendorong mereka dalam melaksanakan shalat lima waktu khususnya salah maghrib dan isya' secara berjama'ah.

Ada pula faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Tim Asistensi Pengabdian. Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang penulis anggap sebagai faktor penghambat lancarnya realisasi program Tim Asistensi Pengabdian, diantara:

- a. Faktor geografis, di desa Sumberjaya terdapat 6 RW (Blok) yang telah dibagi masing-masing agenda Tim Asistensi Pengabdian. Kelompok 124 mendapatkan RW 01, RW 02 dan RW 03. Namun untuk RW 03 kami lepaskan karena jarak tempuhnya yang sangat

jauh sedangkan kami minim kendaraan yang untuk mencapainya harus melewati hamparan sawah yang sangat luas yang apabila malam hari tidak ada penerangan sepanjang jalannya.

- b. Letak Masjid Al-Ikhlas yang jauh dari keramaian, walaupun letaknya berdampingan dengan pusat pemerintahan desa namun jauh dari pemukiman penduduk sehingga menjadi kendala kami dalam melakukan pengabdian karena kami tidak dapat memprediksi setiap hari jumlah anak-anak yang mengaji mengingat jarak rumah ke masjid yang jauh.

D. Pelaksanaan Pendampingan Sosial

Kegiatan pendampingan social dilakukan berupa penyuluhan sampah. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan pemisahan organik dan anorganik bertempat Madrasah MFH. Selain itu, Penyuluhan Sampah Organik menjadi Pupuk Kompos. Dalam program yang dilakukan bersama masyarakat yaitu masalah sampah. Berdasarkan hasil pertemuan rembug warga yang dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat dan pemerintah setempat permasalahan yang timbul dari hasil diskusi tersebut yaitu masalah sampah, kurangnya kualitas pendidikan, dan tidak tertatanya lahan pertanian. Rembug warga dihadiri oleh beberapa kalangan masyarakat dimulai dari Kepala Dusun, para ketua RW, para ketua RT dan Ibu-Ibu Kader serta paratokoh Masyarakat. Selama acara rembug warga berlangsung terjadi suatu diskusi menarik antar warga masyarakat. Dari semua masalah yang terjadi di masyarakat desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka khususnya Dusun I kampung Panyosogan diambil satu masalah yang akan dilaksanakan yaitu masalah sampah. Dengan diambilnya keputusan tersebut yang disetujui oleh masyarakat setempat baik pemerintahannya maupun tokoh masyarakatnya dilakukan penyuluhan

sebagai program awal untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat terkait masalah sampah.

Berdasarkan hasil rembuk warga Pada tanggal 17 februari 2017 dilaksanakan suatu program penyuluhan yang berkaitan dengan sampah sekaligus manfaatnya. Karena sampah juga selain di buang dapat di manfaatkan, seperti sampah organik yang dapat di jadikan suatu pupuk kompos dengan bantuan bakteri, kemudian sampah non-organik seperti botol dapat di jadikan tempat tanaman hias dan kreativitas lainnya. Pada pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan di madrasah Jami'atul khoer ini dimulai dengan pengenalan sampah organik dan non-organik kemudian cara pemanfaatan sampah organik dijadikan kompos yang dilanjutkan dengan praktek di lapangan.

Desa Cidenok yang terletak di Kabupaten Majalengka merupakan salah satu sentra penghasil pangan. Pertanian dan perdagangan yang dilakukan secara tradisional melibatkan sekitar ratusan petani, dan belasan pengepul sayur yang setiap bulannya mengemas sayuran untuk dipasarkan. Dari proses pengemasan yang dilakukan oleh para petani dan pengepul tersebut dihasilkan sampah organik berupa sisa bambu, sisa kayu pembungkus, pelepah pisang, kotoran peternakan, dan sisa-sisa sayuran serta sampah dapur yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari fakta tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat potensi yang belum termanfaatkan dari sampah organik tersebut, selain kerugian terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari kesalahan dalam penanganannya. Saat ini sampah tersebut hanya dibuang atau ditimbun saja di tegalan sehingga bukan hanya menjadi polusi yang mencemari lingkungan, selain mengurangi daya dukung tanah yang menjadi lahan penanaman pangan di sekitar tempat yang menjadi tempat pembuangan sampah tersebut, tapi juga mengganggu kebersihan desa. Selain penanganan secara penimbunan di tegalan, terkadang

juga dilakukan proses pembakaran untuk mengurangi volume sampah tersebut jika dirasa telah mulai mengganggu.

Sampah organik yang dihasilkan dari hasil pertanian dan peternakan tersebut ternyata memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan menjadi pupuk kompos. Pengolahan pupuk kompos dapat dilakukan dengan hanya menimbun sampah organik tersebut dalam tanah untuk ditunggu selama kurang lebih tiga bulan dan kemudian menjadi kompos, atau dapat dilakukan dengan bantuan mikroorganisme khusus yang dapat mengubah sampah organik tersebut menjadi pupuk kompos dalam hitungan hari. Terdapat beberapa macam mikroorganisme yang dapat digunakan untuk membantu dan mempercepat pengomposan sampah organik agar menjadi pupuk kompos. Mikroorganisme tersebut antara lain *Streptomyces* sp., *Acetybacter* sp., *Actynomycetes* sp. Dalam pengabdian yang akan dilakukan ini, audiens akan diajarkan untuk menggunakan bahan aktivator untuk mempercepat pembuatan kompos antara lain produk Dectro, OrgaDec, serta EM-4 yang diproduksi sendiri di Indonesia.

Pupuk kompos yang dihasilkan dari mikroorganisme tersebut dapat digunakan kembali untuk memupuk tanaman pangan untuk meningkatkan kualitas hasil perkebunan dan pertanian yang dilakukan. Penggunaan bantuan mikroorganisme dalam pengolahan sampah organik akan meningkatkan mutu kompos yang dihasilkan, mengurangi rasio volume sampah yang dihasilkan, mengurangi ketergantungan petani akan pupuk buatan, meningkatkan efisiensi perkebunan yang dilakukan, dan secara tidak langsung akan meningkatkan penghasilan petani. Kegiatan penyuluhan dalam pengabdian pada masyarakat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat di Desa Cidenok mengenai cara pembuatan pupuk kompos dari sampah organik, serta perhitungan nilai ekonomis pupuk kompos sebagai alternatif pengganti pupuk buatan.

Pemecahan masalah dilakukan dengan cara penyuluhan atau ceramah singkat dan peragaan cara membuat kompos dengan bantuan “effective microorganism”. Masyarakat peserta penyuluhan diberikan bagan alir proses pembuatan kompos dengan bahan baku yang mudah diperoleh di lingkungan desanya.



Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode ceramah singkat dan demonstrasi atau peragaan alat-alat dan cara membuat kompos. Kegiatan ini dilakukan pada Tanggal 27 Februari 2017 di madrasah jami'atu khoer kampung panyosogan Desa Cidenok mulai jam 13.00 sampai selesai WIB. Diagram alir proses pengomposan, pembuatan alat pengompos, dan bahan baku kompos dijelaskan satu persatu dan kemudian dilanjutkan dengan peragaan proses pembuatan kompos. Beberapa gambar proses

pengkomposan diperlihatkan di layar komputer sehingga penjelasan dengan cara ceramah menjadi lebih jelas.

Peserta penyuluhan proses pembuatan kompos diikuti oleh masyarakat dari dusun satu di desa Cidenok dengan latar belakang yang beragam seperti petani, pedagang, anggota PKK dan pengurus desa Cidenok. Peserta penyuluhan yang cukup banyak menunjukkan adanya perhatian yang cukup besar untuk menambah pengetahuan tentang pembuatan kompos. Ceramah dan diskusi berjalan cukup lancar. Beberapa peserta menanyakan tentang bahan baku kompos yang sangat bervariasi. Narasumber menjelaskan bahwa bahan baku kompos harus memenuhi unsur-unsur hidrogen dan karbon (molase, limbah proses pengolahan gula kelapa, sisa-sisa makanan berupa nasi, jagung atau ubi), daun-daunan kering, unsur N (Nitrogen) dari kotoran dan kencing hewan seperti ayam, sapi dan domba serta mikroorganisme pengurai yang didapatkan dari "effective microorganism (EM-4)".

Ketika diskusi berlangsung, ada beberapa peserta sudah pernah mencoba membuat kompos, bahkan ada yang sudah pernah ikut pelatihan pembuatan kompos di Jawa Barat. Bahan baku dan proses pembuatan kompos yang diikuti oleh masyarakat tersebut hampir sama dengan yang dijelaskan oleh narasumber hanya saja mikroorganisme yang digunakan adalah mikroorganisme alami (tanpa menambahkan "effective microorganism"). Dari diskusi dengan peserta didapatkan informasi bahwa kompos yang dibuat dengan mikroorganisme alami memakan waktu yang cukup lama (3 sampai 4 minggu). Hal ini disebabkan oleh mikroorganisme yang tumbuh pada bahan baku kompos adalah mikroorganisme liar yang tidak selektif untuk proses pengkomposan. Pada diskusi ini dianjurkan menggunakan mikroorganisme yang selektif untuk kompos yang disebut effective microorganism dan mudah dibeli di toko-toko pertanian. Disamping

itu perbandingan bahan-bahan yang merupakan sumber dari Karbon dan Nitrogen seringkali tidak terukur dengan tepat sehingga ketidakseimbangan unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi waktu pengkomposan dan kualitas kompos. Menurut Yuwono (2002), proses pengomposan dapat berjalan dengan baik apabila perbandingan antara komposisi C dengan N berkisar antara 25 : 1 sampai 30 : 1. Di Desa Cidenok, cukup banyak tersedia sumber karbon dan sumber Nitrogen yang baik seperti kotoran kambing.

Pada peragaan pembuatan kompos, dijelaskan pula proses pencacahan bahan baku seperti daun-daunan dan batang pohon-pohonan. Ukuran bahan yang relatif kecil akan memudahkan proses pengkomposan oleh mikroorganisme dan waktu pengkomposan menjadi lebih singkat. Ciri-ciri kompos yang sudah jadi adalah warna berubah menjadi hitam dan remuk. Agar kompos yang diaplikasikan ke tanaman bentuknya seragam, setelah kompos di panen, dilakukan proses pengayakan.

Bahan

Komposisi Zat Gizi Kulit Pisang per 100 gram bahan

No.	Zat Gizi	Kadar
1	Air (g)	68,90
2	Karbohidrat (g)	18,50
3	Lemak (g)	2,11
4	Protein (g)	0,32
5	Kalsium (mg)	715
6	Fosfor (mg)	117
7	Zat besi (mg)	1,60
8	Vitamin B (mg)	0,12
9	Vitamin C (mg)	17,50

Sumber: Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Jatim, Surabaya (1982).

Adapun beberapa manfaat dari kulit pisang yaitu memebantu sistem syaraf, menetralkan keasaman lambung, mencegah stroke, membantu perokok untuk menghilangkan pengaruh nikotin, mengontrol temperatur badan terutama bagi ibu hamil, dan mengurangi stress. Setelah dijelaskan

mengenai kandungan dari kulit pisang dijelaskan proses pembuatan donat kulit pisang tersebut.

Kegiatan penyuluhan pengelolaan limbah organik ini yang menjadi sasarannya adalah seluruh warga masyarakat yang berada didusun satu. Dalam kegiatan ini, pihak-pihak yang terlibat antara lain yaitu kepala dusun, para RW, ibu-ibu PKK dan kader-kadernya beserta masyarakat dusun 1. Hal ini sesuai dengan hasil dari rembug warga, yang mana ibu-ibu kader yang mayoritas ibu rumah tangga memiliki keinginan untuk mempunyai kegiatan dirumah yang dapat menambah penghasilan. Dengan adanya masukan tersebut, maka masyarakat di dusun 1 diberikan penyuluhan yang mana dengan adanya penyuluhan tersebut masalah sampah bisa ditanggulangi dan masalah ekonomi wargapun bisa terbantu. karena dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan bagi warga setempat. Pada acara penyuluhan masyarakat ikut mencoba hasil olahan donat dari kulit pisang.

Penyuluhan tentang pengolahan limbah kulit pisang menjadi bahan makanan alternatif menerima respon positif dari masyarakat setempat. Selama penyuluhan berlangsung masyarakat tertarik dan banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat khususnya ibu-ibu kader menanyakan lebih jelas terkait proses pengolahan tersebut dan ketika mencoba hasil pengolahannya yaitu donat, masyarakat tertarik dan tidak menyangka bahwa donat tersebut berbahan dasar limbah kulit pisang. Hal ini sedikitnya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah untuk mengurangi residu sampah menjadi hal yang bermanfaat sedikitnya meningkat. Penyuluhan ini pun memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat bahwa tidak semua sampah itu adalah hal yang buruk, akan tetapi sampah dapat diolah menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat.

Sebagaimana dipahami bahwa Desa Cidenok memiliki potensi di bidang pertanian, hal ini terlihat dari banyaknya lahan persawahan yang terdapat di desa ini serta sebagian warga masyarakat yang bermatapencarian menjadi petani. Pada musim panen, para petani biasanya bekerja sama dengan buruh tani untuk mengelola hasil panennya dengan sistem bagi hasil.

Hasil panen yang didapatkan oleh petani atau pun buruh tani setelah melalui proses pengeringan akan digiling di tempat penggilingan. Dalam proses penggilingan ini, menghasilkan beras yang terpisah dari kulitnya. Kulit padi yang terpisah dari berasnya akan menumpuk menjadi limbah sekam padi yang menumpuk.

Selama ini limbah sekam padi hanya dimanfaatkan untuk pembakaran batu bata atau dibakar dan dibuang begitu saja. padahal, limbah sekam padi memiliki potensi menjadi bahan bakar alternatif yang memiliki nilai ekonomis serta ramah lingkungan, hal ini dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar yang dewasa ini semakin langka dan harga yang tidak mudah untuk dijangkau oleh ekonomi sebagian masyarakat.

Setelah mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat terkait limbah sekam padi tersebut, maka perlu dilakukan suatu langkah untuk pemecahan masalahnya Adapun metode pemecahan masalah yang digunakan adalah dengan cara pengadaan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemanfaatan limbah sekam padi menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif.

Penyuluhan tentang pemanfaatan limbah sekam padi ini dilaksanakan bersamaan dengan penyuluhan sampah dan pemanfaatan limbah kulit pisang. Adapun penyuluhan tentang pemanfaatan limbah sekam padi ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan masyarakat sebagai

sasarannya. Diharapkan dengan adanya serangkaian penyuluhan ini dapat memberikan sedikit pencerahan bagi masyarakat setempat khususnya dusun satu kampung Panyosogan dalam menanggulangi permasalahan limbah, terkhusus limbah sekam padi. Penyuluhan ini dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat yang diharapkan akan ada langkah lebih lanjut yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan limbah, baik limbah organik maupun limbah anorganik sehingga dapat menjadikan kampung Panyosogan yang bebas sampah dikemudian hari.

Penyuluhan berlangsung dengan penyampaian materi pemanfaatan briket oleh mahasiswa yang meliputi pendahuluan, sekilas tentang pengertian briket, alat dan bahan untuk membuat briket beserta cara pembuatannya, serta pemutaran video tentang pembuatan briket sekam padi.

Adapun langkah pembuatan briket yang dipaparkan pada saat penyuluhan adalah sebagai berikut: Alat dan Bahan

No	Alat	Bahan
1	Wadah untuk arang kasar dan arang halus	Arang
2	Penumbuk/alu	Sekam padi
3	Penyaring	Tepung tapioca
4	Sendok/pengaduk	Ar panas
5	Nampan	
6	Panik	
7	Kompur	

Adapun tahapan pembuatannya adalah sebagai berikut:

1. Arang dihaluskan/ditumbuk dengan alu

2. Setelah dihaluskan, arang disaring
3. Arang halus dicampur dengan tepung tapioka/aci dengan perbandingan 6:1, yakni perbandingan 600 cc (3 gelas) lem aci untuk 1 kg arang
4. Aduk campuran arang dan tepung tapioka
5. Campuran arang dan tepung tapioka dicampur dengan air panas
6. Aduk hingga adonan arang menjadi kalis (adonan jangan terlalu encer
7. Cetak adonan arang membentuk bulatan
8. Keringkan, di bawah sinar matahari selama 2-3 hari atau di dalam oven selama 4-6 jam sampai benar-benar kering dengan hasil sebagai berikut;



Gambar 0.1 Hasil Pembuatan Briket

Dalam penyuluhan ini yang menjadi sasaran utama secara umum adalah seluruh warga dusun satu kampung Panyosogan yang meliputi para remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, para ketua RT dan ketua RW. Selain melibatkan warga masyarakat, dalam penyuluhan ini dihadiri pula oleh BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) kecamatan Sumberjaya yang sengaja diundang untuk memberikan penyuluhan tentang pengolahan sampah.

Hasil dari diadakannya penyuluhan ini adalah tersampainya informasi mengenai pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat yang tentunya menambah wawasan masyarakat. Masyarakat sedikitnya mengetahui bahwa dibalik limbah sekam padi dan arang yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dan terbuang sia-sia ternyata memiliki potensi dan manfaat lain salah satunya adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif.

Menambahnya wawasan masyarakat tentang pemanfaatan limbah sekam padi dan arang menjadi briket ini membuka paradigma masyarakat bahwa segala sesuatu tanpa terkecuali limbah sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat jika dikaji lebih dalam.

Selain itu, dengan pemanfaatan briket menjadi bahan bakar alternatif ini maka masyarakat telah turut berpartisipasi dalam penghematan pemanfaatan energi yang saat ini sudah mulai terbatas ketersediaannya. Tidak kalah penting pula adalah bahwa dengan penggunaan briket ini, masyarakat telah menggunakan energi yang ramah lingkungan, hal ini dikarenakan bahan bakar briket ini tidak menimbulkan polusi udara dan berbau dasar limbah organik serta tidak mengandung bahan campuran kimia sehingga tidak mencemari lingkungan.

Pembuatan briket sekam padi dan arang ini sangatlah menjanjikan, hal ini dikarenakan dalam proses pembuatannya menjadi bahan bakar alternatif, tidak diperlukan modal yang besar, masyarakat cukup menggunakan alat-alat sederhana yang mudah didapatkan. Pembuatan briket sekam padi atau arang juga ini dapat dengan mudah dipraktikkan langsung oleh masyarakat.

Dengan terbukanya wawasan masyarakat ini, maka terbuka pula peluang bagi masyarakat dusun satu kampung panyosogan untuk berinisiatif membuka usaha terkait pemanfaatan limbah sekam padi dan arang ini, jika

hal ini direalisasikan lebih lanjut oleh masyarakat tentunya akan menambah pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat sehingga diharapkan dimasa yang akan datang dapat menjadikan kampung panyosogan lebih sejahtera.

Kegiatan penyuluhan pengelolaan limbah organik ini yang menjadi sasarannya adalah seluruh warga masyarakat yang berada didusun satu. Dalam kegiatan ini, pihak-pihak yang terlibat antara lain yaitu kepala dusun, para RW, ibu-ibu PKK dan kader-kadernya beserta masyarakat dusun 1. Hal ini sesuai dengan hasil dari rembug warga, yang mana ibu-ibu kader yang mayoritas ibu rumah tangga memiliki keinginan untuk mempunyai kegiatan dirumah yang dapat menambah penghasilan. Dengan adanya masukan tersebut, maka masyarakat di dusun 1 diberikan penyuluhan yang mana dengan adanya penyuluhan tersebut masalah sampah bisa ditanggulangi dan masalah ekonomi wargapun bisa terbantu. karena dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan bagi warga setempat. Pada acara penyuluhan masyarakat ikut mencoba hasil olahan donat dari kulit pisang.

Penyuluhan tentang pengolahan limbah kulit pisang menjadi bahan makanan alternatif menerima respon positif dari masyarakat setempat. Selama penyuluhan berlangsung masyarakat tertarik dan banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat khususnya ibu-ibu kader menanyakan lebih jelas terkait proses pengolahan tersebut dan ketika mencoba hasil pengolahannya yaitu donat, masyarakat tertarik dan tidak menyangka bahwa donat tersebut berbahan dasar limbah kulit pisang. Hal ini sedikitnya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah untuk mengurangi residu sampah menjadi hal yang bermanfaat sedikitnya meningkat. Penyuluhan ini pun memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat bahwa tidak semua sampah itu adalah hal yang buruk, akan tetapi sampah dapat diolah menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat.

Hambatan yang muncul dari penyuluhan ini adalah sedikitnya warga yang datang saat penyuluhan. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan bersamaan dengan kegiatan rutin yang ada diwilayah setempat. Akan tetapi, masalah tersebut dapat terselesaikan dikarenakan masyarakat yang tidak hadirpun bisa mendapatkan ilmu dari beberapa warga yang hadir.

Adapun faktor pendukungnya adalah antusias dari warga masyarakat yang hadir dalam mengikuti penyuluhan tersebut mengingat bahwa di daerah dusun satu sendiri banyak terdapat banyak pohon pisang sehingga limbahnya nanti dapat digunakan dalam pengolahan makanan alternatif.

E. Pendampingan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah usaha bagi seorang individu untuk mempersiapkan dirinya di masa mendatang, agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang disekelilingnya maupun di masyarakat. Pendidikan juga merupakan sebuah usaha mengembangkan potensi diri dalam mengasah keterampilan yang dimiliki, juga merupakan sebuah upaya untuk menjadikan seorang individu memiliki budi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan berperilaku yang baik sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat. Pendidikan ini didapatkan oleh seorang individu melalui pengajaran dan pelatihan secara berulang-ulang dan terus-menerus, yang didapatkannya melalui bimbingan orang tua maupun pendidik pada masa pertumbuhan untuk mencapai tingkat kedewasaan. Selain itu pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk menyiapkan dirinya dalam suatu kehidupan yang lebih bermakna di masa mendatang. Dengan adanya pendidikan manusia secara tidak langsung dipaksa untuk menjadi seorang pemikir, sehingga ia dapat melangsungkan kehidupan yang baik di bermasyarakat.

Di Desa Cidenok terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran kolektif masyarakat dalam memandang makna pendidikan. Pada umumnya sistem pendidikan yang ada di Desa Sirnaresmi tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan di wilayah lain, mereka telah menggunakan sistem pendidikan nasional seperti PAUD, SD Negeri dan SMP Negeri. Namun, walaupun tidak terlihat berbeda dengan sistem pendidikan di wilayah lain, pada realitanya terjadi beberapa masalah dalam kemajuan bidang pendidikan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pendidikan. Kurangnya kesadaran masyarakat ini disebabkan karena pola pikir masyarakatnya yang masih mengenyampingkan pendidikan, baik dari muridnya sendiri maupun dari pihak orangtuanya. Dukungan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak jadi faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan proses pendidikan anak. Dukungan yang diberikan oleh orangtua kepada anak bisa dalam bentuk dukungan moral maupun dukungan secara materil, jika anak tidak mendapatkan dukungan penuh dari orangtuanya maka proses pendidikannya pun akan terhambat bahkan gagal.

Selain faktor orang tua, faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor pendukung bagi keberlangsungan proses belajar anak. Di Desa Sirnaresmi yang notabene merupakan masyarakat dengan kelas menengah ke bawah, tentu menjadi beban bagi para orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Besarnya biaya sekolah dan biaya transportasi untuk anak menjadi beban tersendiri bagi para orang tua dalam memberikan pendidikan formal untuk anaknya, sehingga tidak jarang di masyarakat Desa Sirnaresmi bahwa anak dipandang lebih bermanfaat untuk membantu orang tuanya bertani dan menggembala kerbau di sawah daripada harus pergi ke sekolah. Terutama kepada anak perempuan dimana orang tua sering menanamkan doktrin bahwa setinggi-tingginya anak perempuan sekolah pada akhirnya akan pergi ke dapur juga, sehingga tidak jarang di Desa Sirnaresmi anak perempuan

yang masih dini sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Kurangnya kesadaran orang tua dan kendala dalam faktor ekonomi tentu menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan proses pendidikan anak dalam membentuk manusia yang berkompeten, demi mewujudkan suatu bangsa yang bermartabat.

Teori Solidaritas mekanik yang juga disebut sebagai teori kesadaran kolektif yang dicetuskan oleh Emile Durkheim, sangat relevan dengan permasalahan yang ada di Desa Sirnaresmi. Teori kesadaran kolektif Emile Durkheim terbentuk karena adanya kepercayaan dan perasaan bersama antar individunya, sehingga teori ini sangat relevan dengan keadaan di masyarakat Desa Sirnaresmi yang notabene merupakan masyarakat tradisional, yang masih memegang teguh nilai tradisi yang menjadi pedoman hidup di masyarakat Kasepuhan Adat. Masyarakat Desa Sirnaresmi memiliki nilai kekerabatan dan rasa persaudaraan yang tinggi, dengan begitu mereka sangat menghargai sesama demi tercapainya ketentraman dan keharmonisan antar individunya dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Tidak hanya pada sesama individu masyarakat Desa Sirnaresmi juga sangat menghargai alam, bagi mereka alam maupun tumbuhan juga memiliki ruh yang harus dijaga dan diperlakukan dengan benar.

Teori kesadaran kolektif juga sangat erat kaitannya dengan Agama, masyarakat yang masih memegang agama primitif cenderung memiliki kesadaran kolektif yang sangat tinggi. Sama halnya dengan Desa Sirnaresmi yang masih kental dengan ajaran Animisme dan Dinamismenya, dimana setiap ucapan maupun perilaku di Desa ini harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nenek Moyang mereka, itu artinya setiap perilaku di masyarakatnya tidak boleh ada yang melanggar aturan yang sudah menjadi tradisi di Kasepuhan. Dan yang menjadi permasalahannya adalah ajaran kepercayaan yang diberikan oleh Kasepuhan berbeda dengan ajaran agama

yang ada di sekolah-sekolah, jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seoserang, maka ajaran kasepuhan semakin ditinggalkan. Namun tidak jarang juga masyarakat yang masih memgang teguh tradisi di kasepuhan adat, mereka rela tidak memberikan pendidikan formal kepada anaknya agar nilai tradisi di kasepuhan adat tetap terjaga dan bisa dilestarikan.

Peran orang tua atau pendidik adalah mengarahkan dan mengajarkan anak agar menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya, membentuk kepribadian dan berakhlak mulia sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَأِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Yang artinya: “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata pada anaknya, ketika ia memberi pelajaran pada anaknya, “Wahai Anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar.”

Ayat tersebut menerangkan tentang perintah orangtua kepada anaknya, agar orangtua senantiasa memberikan pendidikan aqidah yang kokoh. Selain itu, orangtua juga harus mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, karena salah satu perbuatan yang dhalim dan dibenci oleh Allah yaitu dengan menyekutukannya.

Pendidikan yang baik disuatu bangsa akan membuat bangsa itu semakin maju, karena dari kualitas pendidikan inilah akan melahirkan generasi-generasi yang unggul dan berkompeten di bidangnya, sehingga mampu bersaing dengan pesatnya globalisasi tanpa terbawa arus. Pendidikan menjadi bekal seorang individu dalam menghadapi arus globalisasi, menciptakan inovasi, serta menangani permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga dapat memberikan kemajuan bagi bangsa itu sendiri.

Pendidikan merupakan suatu hal yang utama dalam mengembangkan sumber daya manusia dan masyarakat suatu bangsa. Peran orang tua dan pendidik juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Tidak hanya dilingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat juga mendominasi pola pikir dan perilaku anak dalam menjalankan aktivitas dan mempersiapkan kehidupannya di masa mendatang. Dengan pendidikan diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi perubahan zaman di masa mendatang. Selain itu, pendidikan juga diharapkan mampu memberikan dukungan untuk kemajuan bangsa Indonesia dan menjadikannya negara yang lebih produktif, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, maupun sosial budaya.



Di dalam kehidupan sosial pasti tidak terlepas dari suatu proses yang menuju pada perkembangan suatu masyarakat. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat tersebut mencakup unsur-unsur seperti geografi, biologi, ekonomi, teknologi, kebudayaan dan pendidikan. Aspek-aspek tersebut juga sangat mendukung akan perubahan yang tengah terjadi di masyarakat Desa Sirnaresmi, khususnya perkembangan dalam bidang pendidikan.

Semakin berkembangnya zaman, semakin canggihnya teknologi, tentunya semakin banyak pula perubahan dalam pola pikir di masyarakat. Pola pikir masyarakat yang telah berubah bukan berarti kebudayaan di daerah tersebut juga ikut berubah, melainkan ada nilai-nilai yang menjadi pertimbangan dalam menjalankan sosial budaya di masyarakat tersebut. Di Desa Sirnaresmi untuk saat ini pola pikir masyarakatnya sudah mulai berubah, mereka sudah mulai terbuka akan ilmu pengetahuan, serta sudah mulai faham akan pentingnya suatu pendidikan untuk menunjang kehidupan di masa mendatang.

Dimulai dari pemikiran Ketua Adat Desa Sirnaresmi yaitu Abah Asep Nugraha, beliau telah memberikan contoh kepada masyarakat Kasepuhan Adat agar tetap menjalankan proses pendidikan, tanpa meninggalkan kebudayaan setempat yang telah menjadi identitas warga Kasepuhan. Berbeda dengan Ketua Adat terdahulu yang memang cenderung mengenyampingkan pendidikan, sebaliknya Abah Asep memiliki pemikiran yang terbuka akan pendidikan, hal ini terbukti dari diraihnya gelar S1 oleh beliau begitupun dengan kedua anaknya yang sudah meraih gelar Sarjana.

Masyarakat di Desa Sirnaresmi kini sudah mulai berkembang dalam bidang pendidikan, hal ini dapat terlihat dari antusias para orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya. Dulu, penduduk Desa Sirnaresmi jarang sekali ada yang keluar dari lingkungan Kasepuhan Adat, sehingga masyarakatnya pun hanya mengenyam pendidikan SD dan SMP saja, itu pun

sangat jarang sekali yang melanjutkan sampai ke tingkat SMP. Alasan para orang tua tidak menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat SMA adalah karena letaknya yang sangat jauh, dan itu pun hanya ada satu SMA saja, serta letak sekolahnya yang berada di Kecamatan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iwan Suwandri selaku Kepala Desa Sirnaresmi:

Akibat kamajuan zaman anu tos moderen, nyaeta nyandak perobihan dina cara berpikir masyarakat adat, salah sawiosna dina pendidikan. Zaman ayena sakola atos seueur, masyarakat atos seueur anu gaduh motor, sareng Abah na oge ayena atos ngagaduhan gelar sarjana. Kukituna masyarakat teh nyonto ti Abah anu mangrupi janten pieunteungeun kangge masyarakatna. (Wawancara pada Tanggal 27 Maret 2020, Jam 08.50 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa masyarakat Desa Sirnaresmi kini sudah mulai mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dalam bidang pendidikan. Selain dikarenakan sudah mulai berubahnya pola pikir masyarakat, ditunjang juga dengan aspek-aspek lain seperti sudah mulai banyaknya berdiri sekolah-sekolah, masyarakat sudah banyak yang memiliki handpone sebagai salah satu sumber informasi, serta masyarakat sudah banyak yang bisa mengendarai motor. Sehingga dengan mengendarai motor, jarak yang di tempuh dari Desa Sirnaresmi ke SMAN 1 Sumberjaya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit saja.

Kearifan lokal yang masih terus dijaga di masyarakat adat Desa Cidenok, yaitu masih melestarikan adat istiadat yang menjadi warisan dari para leluhur mereka. Dimanapun mereka, dan sejauh apapun mereka merantau selalu memberikan ciri khas identitas mereka sebagai warga kasepuhan, salah satunya dengan menggunakan ikat kepala (untuk laki). Dan bagi para perantau yang notabenenya asli dari kasepuhan, sejauh apapun mereka merantau ketika di kasepuhan sedang ada acara besar seperti upacara

Seren Taun, mereka akan kembali ke kampung halamannya untuk mendapatkan berkah alam.

Dalam pembelajaran di sekolah pun, ada keunikan lain yang menjadikan masyarakat ini mempunyai ciri khas dari masyarakat yang lainnya. Misalnya di setiap SD yang berada di Desa Cidenok, setiap hari Kamis dan Jumat para muridnya diwajibkan untuk memakai pakaian adat saat kegiatan di sekolah, yaitu untuk para siswinya memakai baju Kebaya dan rok Sinjang yang terbuat dari kain batik, serta untuk para siswanya memakai baju Pangsi dan ikat kepala berbahan dasar kain batik.

Masyarakat adat Desa Cidenok merupakan masyarakat yang mayoritasnya sebagai petani dan sangat menghargai hasil alam terutama padi. Tidak heran jika di dalam pendidikan SD pun terdapat mata pelajaran lokal yang berkaitan dengan cara bertani, disana para murid diajarkan dasar-dasar pertanian, sehingga para murid minimal tahu bagaimana cara bertani ketika mereka lulus dari SD. Dan hal tersebut juga merupakan hal wajib, yang telah diberikan oleh kasepuhan kepada seluruh SD yang berada di lingkungan Desa Cidenok.

Tidak jarang juga dalam acara-acara yang diadakan oleh pihak sekolah salah satunya seperti pada Milad SMAN 1 Sumberjaya, beberapa siswa yang notabannya berasal dari masyarakat adat menampilkan salah satu kesenian asli kasepuhan yaitu Ngalaes dan Debus. Kesenian Ngalaes dan Debus merupakan kesenian asli masyarakat kasepuhan adat Desa Cidenok, yang diwariskan secara turun temurun oleh para leluhurnya kepada incu putunya. Kesenian Ngalaes dan Debus juga merupakan atraksi yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, hanya orang-orang tertentu asli dari kasepuhan saja dan yang sudah mendapatkan restu dari Ketua Adat yang diperbolehkan melakukan atraksi ini. Karena dalam melakukan atraksi ini

ada jampe-jampe (doa-doa) tertentu dari kasepuhan yang harus dibacakan untuk keselamatan para pemainnya.

BAB III

EVALUASI KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian diklasifikasikan ke dalam tiga aspek yakni agama, Pendidikan dan social. Kegiatan ini juga dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan berupa “Ketrampilan sosial” (social skills) dari para pemimpin, tokoh dan aktivis komunitas seperti kepemimpinan, kemampuan manajerial organisasi atau gerakan komunitas, serta penerangan dan penyuluhan masalah-masalah sosial.

- Materi pengabdian dapat dikembangkan terus menerus oleh suatu Tim Pakar Pendidikan Masyarakat dengan menerima masukan dari segenap unsur didalam masyarakat untuk menjawab berbagai masalah yang berkembang (mis. Penerangan tentang Narkoba dan teknik-teknik komunitas dalam melakukan perang melawan narkoba, Teknik pengembangan keamanan lingkungan, Pengabdian kepemimpinan dan pengetahuan masalah perkotaan bagi ketua RT/RW, anggota Pihak Kelurahan, masalah agama, masalah social dan Pendidikan serta lainnya.)
- Peserta pengabdian terutama para aktivis atau orang-orang yang berpengaruh di komunitas Cidenok Sumberjaya Majalengka (baik spatial, primordial maupun okupasional).

Dari aspek perencanaan, kegiatan ini sudah cukup baik, sebab pada rapat tim panitia terdapat perencaan kegiatan yang sudah matang. Selanjutnya terdapatmenyusun outline/susunan step yang baik. Hanya saja ada sebagian panitia yang masih harus diberdayakan.

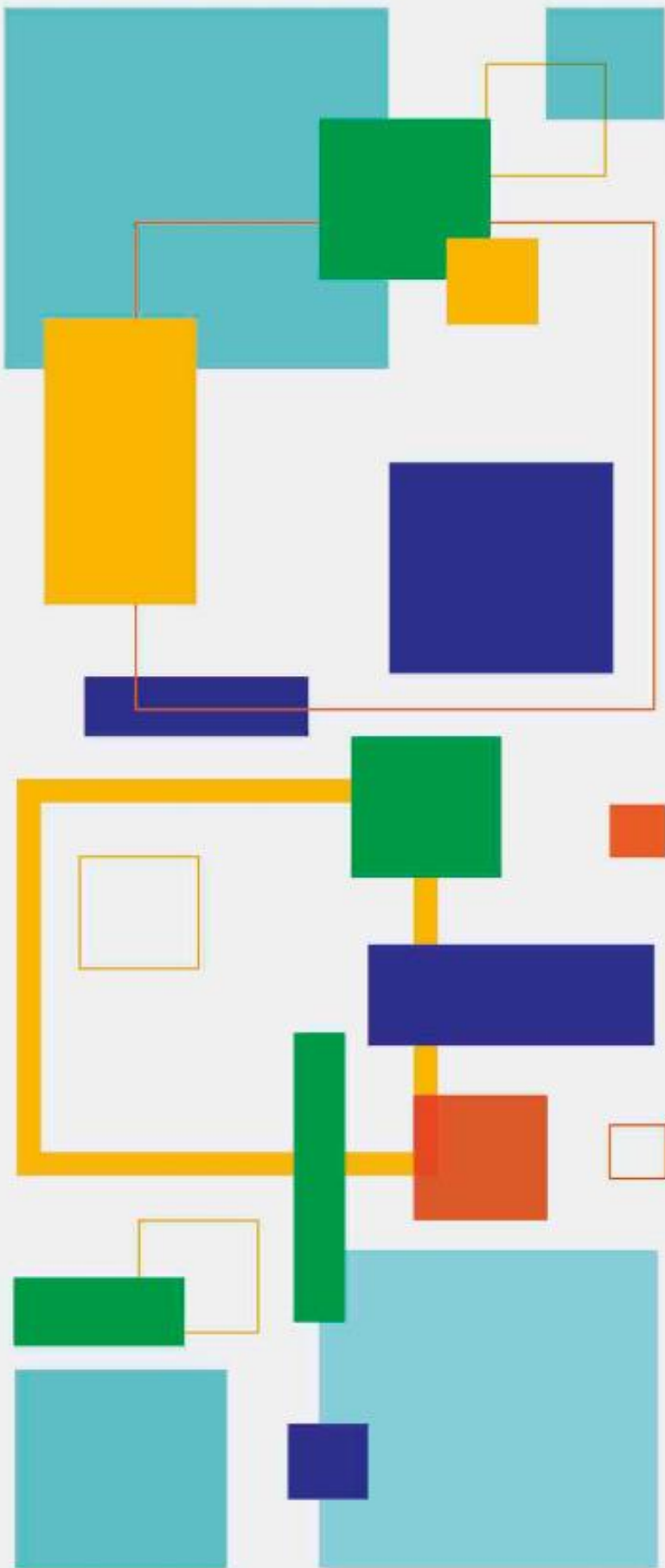
Namun secara umum keगतannya terlaksana dengan lancar baik, timing, materi, maupun peserta dan dukungan. Ini karena terdapat upaya

mempersiapkan dari semua pihak. Tim panitia juga dapat mengembangkan dari kegiatan. bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.

Dari kegiatan yang dilakukan, ada sejumlah hal yang dapat dipertimbangkan dalam rangka melaksanakan kegiatan berikutnya, diantaranya: Sebagai pemahaman awal, perlu dikemukakan bahwa kegiatan ini harus dipahami sebagai bagian dari kerjaan bersama dan perlu melibatkan berbagai komponen untuk menyelesaikannya. Berbagai pihak itu harus bersinerji satu sama lain. Ketiadaan dukungan satu pihak akan sangat mengganggu keberhasilan kegiatan.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, Pierre and Louïc Wacquant. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago. IL: University of Chicago Press.
- Bourdieu, Pierre.1986. *The Forms of Capital*. Dalam J Richardson, ed. *Handboooks of Theory and research for Socoiology of Education*. Westport, CT: Greenwood Press.
- .. 1984. The Form of Capital. In In Nicole Woolsey Biggart (ed.) 2002. *Economic Sociology*. Blackwell Publishing.
- Brennan, Karen A. 2013. *"Best Of Both Worlds: Issues Of Structure And Agency In Computational Creation, In And Out Of School*. Ph.D. Dissertations.
- Checkland, p. and Scholes, J. 1999. *Soft Systems Methodology in Action*, Wiley.
- Coleman James S. 1990. *Foundations of Social Theory*, Cambridge MA: Harvard University Press.
- , 1998. *Social Capital in The Creation of Human Capital*, USA: American Journal of Sociology, Suplement, 94, pp. S95-S120.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design*. Sage: London.
- Dees, Gregory J. 1998. *The Meaning of Social Entrepreneurship*, Kauffman Center for Enterprenurial Leadership.
- Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakann Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama)



LP2M UIN SGD BANDUNG

ISBN 978-623-0946-89-3

